

## **SKRIPSI**

# **PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DI FUNGSI PENDIDIKAN KESEHATAN DAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI ACEH PERIODE 2016-2019 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Disusun Oleh:**

**IRSALINA  
NIM. 180602106**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Irsalina  
NIM : 180602106  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan Mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin Pemiliknya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2023

Yang Menyatakan



*Irsalina*  
Irsalina

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

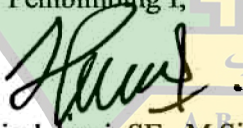
**Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan Kesehatan dan  
Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh  
Periode 2016-2019 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Disusun Oleh:

Irsalina  
NIM. 180602106

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Khairul Amri, SE., M.Si  
NIDN. 0106077507

Pembimbing II,



Mursalmi, ME  
NIP. 199211172020121011

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Irsalina  
NIM. 180602106

Dengan Judul

**Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan Kesehatan dan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Periode 2016-2019 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

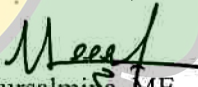
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Desember 2022 M  
5 Jumadil Akhir 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Khairul Amri, S.E., M.Si  
NIDN. 0106077507

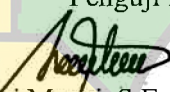
Sekretaris,

  
Mursalmina, ME  
NIP. 199211172020121011

Penguji I,

  
Dr. Zainuddin, S.E., M.Si  
NIDN. 01081077105

Penguji II,

  
Seri Murni, S.E., M.Si. Ak  
NIP. 197210112014112001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Hafas Firdani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

KEMENTERIAN AGAMA  
UIN AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Irsalina

NIM : 180602106

Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 180602106@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir  
yang berjudul:

☐ KKKU

☐ Skripsi

☐ ...

**Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan Kesehatan dan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Periode 2016-2019 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 April 2023

Mengetahui,

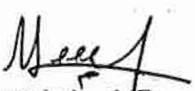
Penulis,

  
Irsalina  
NIM. 180602106

Pembimbing I,

  
Khairul Amri, SE., M.Si  
NIDN: 0106077507

Pembimbing II,

  
Mursalmida, ME  
NIP: 199211172020121011

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru dan mencoba sesuatu yang lain terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Najwa Shihab)

“Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi. Perjuangan yang harus dimenangkan. Kesusahan yang harus diatasi. Rahasia yang harus digali. Tragedi yang harus dialami.”

(Merry Riana)

Alhamdulillahirabbil'alamin, sujud syukur hamba persembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang. Atas takdir-Mulah yang telah menjadikan hamba manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan rasa bangga bercampur bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan penguasa langit dan bumi yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Saya persembahkan skripsi ini untuk Ayah dan ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta tiada hentinya do'a yang dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa hanya untuk mewujudkan impian saya. Ucapan terima kasih saja takkan mampu membalas jasa kedua orang tua saya yang selama ini telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti serta bekerja keras hanya untuk mencari nafkah untuk membiayai anaknya dalam meraih cita-cita. Terimakasih untuk Ayah ku tercinta Dahlan Daud, dan ibu ku tersayang Asniah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Periode 2016-2020 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan baik. shawatul serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat.

Penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada beberapa kekurangan dan kesilapan dalam penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, Namun, berkat bantuan dan support dari berbagai pihak penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Khairul Amri S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Mursalmina, ME selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala waktu, ilmu, arahan, dan pemikiran yang sangat baik yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Zainuddin, S.E., M.Si selaku penguji I dan Seri Murni, S.E., M.Si. Ak selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahan terhadap penyempurnaan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik (PA) Hafidhah, SE., M.Si, Ak. CA serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
7. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak H. M. Dahlan dan Ibu Hj. Asniah. Terimakasih Ayah dan Ibu atas segala do'a, cinta, kasih sayang, kepercayaan, pengorbanan, support, ide, dan senantiasa berada disisi penulis dalam situasi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Keluarga semuanya, abang dan kakak satu-satunya, terimakasih karena telah memberi semangat, dukungan,

motivasi tiada henti kepada penulis sampai saat ini, semoga kita bisa sukses dan dapat membanggakan orang tua.

9. Kepada seluruh teman Ekonomi Syariah angkatan 2018 beserta sahabat-sahabat yang sangat sering membantu dalam banyak hal dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Serta terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa serta bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Terimakasih atas segalanya. Semoga kesuksesan segera menghampiri kita.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka. dengan segala harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

*Jazakumullahu khairan,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Banda Aceh, 24 November 2022

Penulis,

Irsalina

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U/1987

**1. Konsonan**

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | Ṭ     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Ẓ     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | Ṣ                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | Ḥ                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ẓ                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | Ṣ                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | Ḍ                  |    |      |       |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِی             | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌ِو             | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haura* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                            | Huruf dan Tanda |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| اِي              | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i><br>atau <i>ya</i> | Ā               |
| ي                | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                     | Ī               |
| يُ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                    | Ū               |

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu transliterasikan dengan h.

Contoh:

*rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Talha* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

AR - RANIRY

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Irsalina  
NIM : 180602106  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Belanja Pemerintah Di Fungsi Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Aceh Periode 2016-2019 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
Pembimbing I : Khairul Amri, S.E., M. Si  
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Pembangunan merupakan tujuan suatu Negara maupun wilayah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia yakni melalui realisasi belanja pemerintah dari berbagai sektor seperti belanja pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor ekonomi. Dimana peningkatan modal manusia sebagian besar dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Sedangkan ekonomi berperan dalam memperlancar arus perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa *time series* yaitu tahun 2016-2019. Metode analisis data menggunakan regresi data panel, model estimasi data panel yang terpilih yaitu FEM (*Fixed Effect Model*) melalui uji Hausman yang diproses dengan menggunakan Eviews. Jumlah sampel sebanyak 23 kabupaten/kota yang terdaftar di BPS dan Kementerian Keuangan Aceh tahun 2016-2019. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah pada pendidikan (X1), Variabel belanja pemerintah pada kesehatan (X2), dan variabel belanja pemerintah pada ekonomi (X3) berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dan Secara simultan (uji F) ketiga variabel dependen tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Kata Kunci:** *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi*

## DAFTAR ISI

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>                                         | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>                                        | <b>iv</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL .....</b>                                           | <b>v</b>     |
| <b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>                                      | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                    | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                           | <b>viii</b>  |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>                                     | <b>xi</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                   | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                               | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                            | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                             | <b>xxi</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                    | <br><b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                                                       | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                             | 6            |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                            | 6            |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                                           | 7            |
| 1.5 Sistematika Penulisan.....                                                        | 7            |
| <br><b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                                                 | <br><b>9</b> |
| 2.1 Indeks Pembangunan Manusia .....                                                  | 9            |
| 2.2 Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan .....                                        | 12           |
| 2.3 Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi .....                                           | 13           |
| 2.4 Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan .....                                         | 14           |
| 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Ditinjau Dalam<br>Perspektif Ekonomi Islam .....       | 15           |
| 2.6 Konsep Pengeluaran Pemerintah.....                                                | 27           |
| 2.7 Pengeluaran Pemerintah Dalam Perspektif Islam .....                               | 30           |
| 2.8 Penelitian Terkait .....                                                          | 34           |
| 2.9 Keterkaitan Antar Variabel.....                                                   | 41           |
| 2.9.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan<br>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... | 41           |
| 2.10 Kerangka Pemikiran .....                                                         | 44           |
| 2.11 Hipotesis.....                                                                   | 45           |

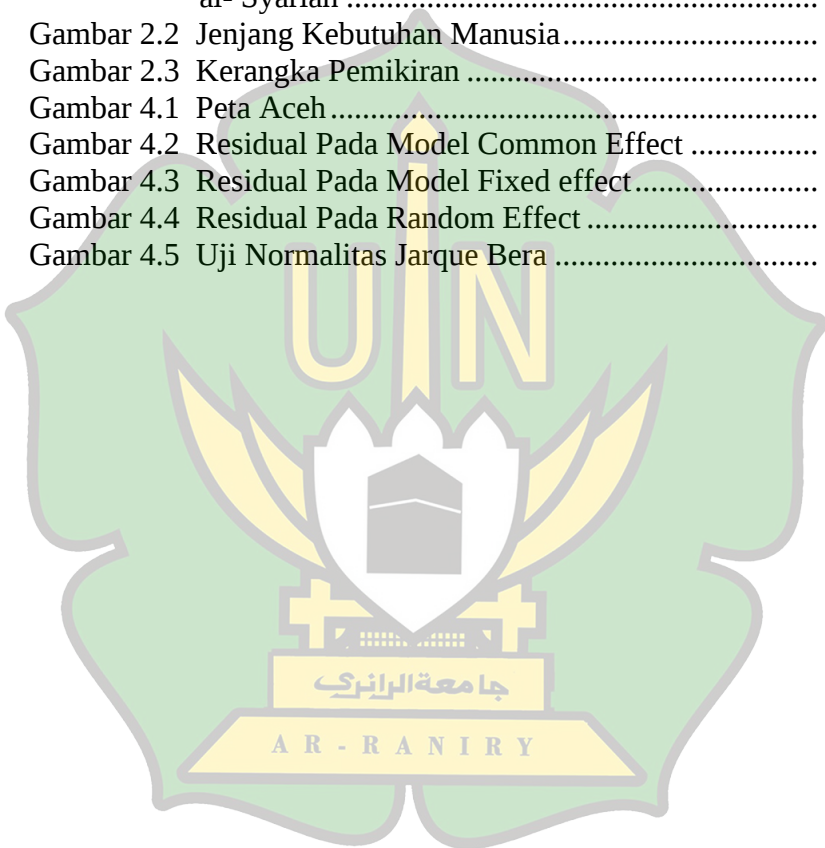
|                                                                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>                                                                                                                             | <b>47</b>     |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                                            | 47            |
| 3.2 Jenis dan Sumber data .....                                                                                                                                       | 47            |
| 3.3 Variabel Penelitian .....                                                                                                                                         | 48            |
| 3.4 Operasional Variabel .....                                                                                                                                        | 48            |
| 3.5 Metode Analisis.....                                                                                                                                              | 49            |
| 3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....                                                                                                                          | 49            |
| 3.5.2 Metode Estimasi Data Panel .....                                                                                                                                | 50            |
| 3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....                                                                                                                                          | 52            |
| 3.5.4 Uji Hipotesis .....                                                                                                                                             | 54            |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                               | <br><b>56</b> |
| 4.1 Gambaran Aceh.....                                                                                                                                                | 56            |
| 4.1.1 Kondisi Geografis .....                                                                                                                                         | 56            |
| 4.1.2 Daerah di Aceh.....                                                                                                                                             | 57            |
| 4.2 Hasil Penelitian.....                                                                                                                                             | 59            |
| 4.2.1 Statistik Deskriptif .....                                                                                                                                      | 59            |
| 4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel .....                                                                                                                        | 62            |
| 4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....                                                                                                                                          | 66            |
| 4.2.2 Uji Regresi Linear Berganda.....                                                                                                                                | 69            |
| 4.2.5 Uji Hipotesis .....                                                                                                                                             | 71            |
| 4.3 Pembahasan .....                                                                                                                                                  | 74            |
| 4.3.1 Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan ( $X_1$ ) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh .....                                           | 74            |
| 4.3.2 Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Kesehatan ( $X_2$ ) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh .....                                            | 76            |
| 4.3.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Di Fungsi Ekonomi ( $X_3$ ) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh.....                                               | 77            |
| 4.3.4 Pengaruh Belanja Pemerintah Di Fungsi Pendidikan ( $X_1$ ), Kesehatan ( $X_2$ ) dan Ekonomi ( $X_3$ ) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh..... | 79            |

|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3.5 Pengaruh Belanja Pemerintah Di Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Di Tinjau Dalam Persepektif Islam ..... | 79         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                            | <b>81</b>  |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                   | 81         |
| 5.2 Saran.....                                                                                                        | 83         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                           | <b>85</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                 | <b>90</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                     | <b>107</b> |



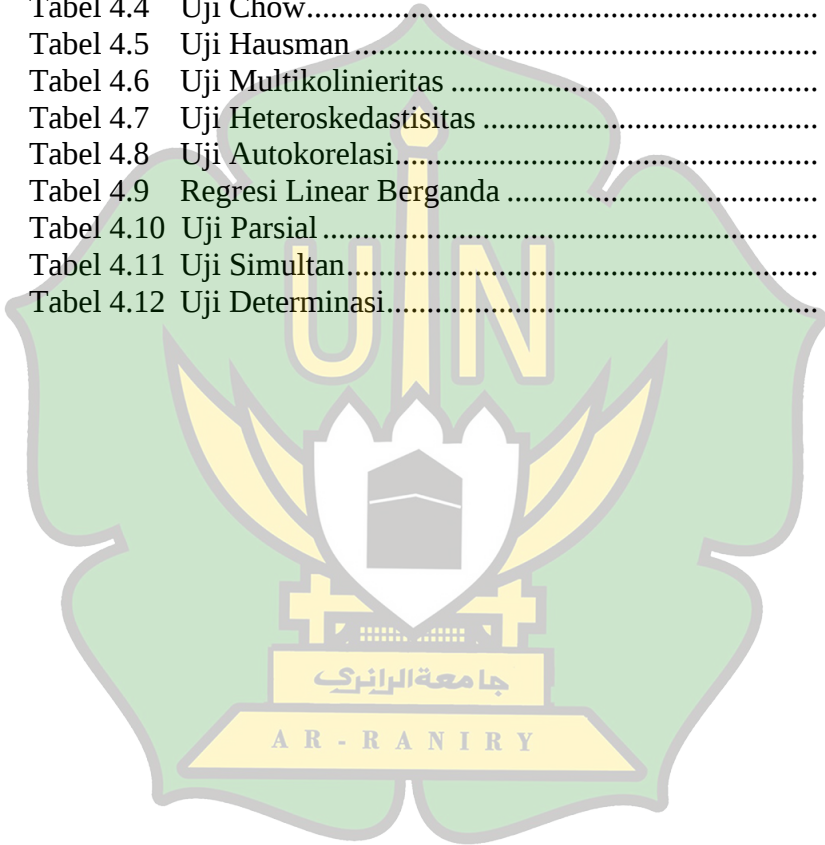
## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                         |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh, 2016-2019 .....                                         | 4  |
| Gambar 2.1 | Satu Kesatuan Dimensi Maqashid Syariah<br>Human Well- Being: The Light of Maqashid<br>al- Syariah ..... | 22 |
| Gambar 2.2 | Jenjang Kebutuhan Manusia.....                                                                          | 23 |
| Gambar 2.3 | Kerangka Pemikiran .....                                                                                | 45 |
| Gambar 4.1 | Peta Aceh .....                                                                                         | 56 |
| Gambar 4.2 | Residual Pada Model Common Effect .....                                                                 | 64 |
| Gambar 4.3 | Residual Pada Model Fixed effect.....                                                                   | 65 |
| Gambar 4.4 | Residual Pada Random Effect .....                                                                       | 65 |
| Gambar 4.5 | Uji Normalitas Jarque Bera .....                                                                        | 66 |



## DAFTAR TABEL

|            |                                              |    |
|------------|----------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Penelitian Terkait.....                      | 38 |
| Tabel 4.1  | Kabupaten Atau Kota dan Ibukota di Aceh..... | 57 |
| Tabel 4.2  | Pembagian Wilayah di Aceh .....              | 58 |
| Tabel 4.3  | Deskripsi Variabel .....                     | 60 |
| Tabel 4.4  | Uji Chow.....                                | 62 |
| Tabel 4.5  | Uji Hausman .....                            | 63 |
| Tabel 4.6  | Uji Multikolinieritas .....                  | 67 |
| Tabel 4.7  | Uji Heteroskedastisitas .....                | 68 |
| Tabel 4.8  | Uji Autokorelasi.....                        | 69 |
| Tabel 4.9  | Regresi Linear Berganda .....                | 70 |
| Tabel 4.10 | Uji Parsial.....                             | 72 |
| Tabel 4.11 | Uji Simultan.....                            | 73 |
| Tabel 4.12 | Uji Determinasi.....                         | 74 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|               |                                                              |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran I    | Data Variabel.....                                           | 90  |
| Lampiran II   | Statistik Deskriptif.....                                    | 96  |
| Lampiran III  | Estimasi Menggunakan Pendekatan<br>Common Effect Model ..... | 97  |
| Lampiran IV   | Estimasi Menggunakan Pendekatan Fixed<br>Effect Model .....  | 98  |
| Lampiran V    | Estimasi Menggunakan Pendekatan<br>Random Effect Model ..... | 99  |
| Lampiran VI   | Uji Chow .....                                               | 100 |
| Lampiran VII  | Uji Hausman.....                                             | 101 |
| Lampiran VIII | Uji Multikolinieritas .....                                  | 102 |
| Lampiran IX   | Uji Heterokedastisitas.....                                  | 102 |
| Lampiran X    | Gambar Grafik Uji Normalitas .....                           | 103 |
| Lampiran XI   | Gambar Residual Pada Model Common<br>Effect .....            | 103 |
| Lampiran XII  | Gambar Residual Pada Model Fixed Effect ...                  | 104 |
| Lampiran XIII | Gambar Residual Pada Model Random<br>Effect .....            | 105 |
| Lampiran XIV  | Grafik Ipm Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.                    | 106 |

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu Negara. Dikatakan maju bukan hanya dihitung dari pendapatan suatu daerah saja tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi suatu daerah yang diberikan kepada masyarakatnya (Widodo, 2011). Ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk memperluas kesempatan penduduknya agar mencapai kesejahteraan yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2020).

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan

produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, social, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan (Laeli, 2020).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap daerah. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang layak. Indikator dan variabel yang dipakai dalam Indeks Pembangunan Manusia ini adalah variabel-variabel yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa dimensi-dimensi utama yaitu dimensi ekonomi, kesehatan dan dimensi pendidikan (Mirza, 2012:2)

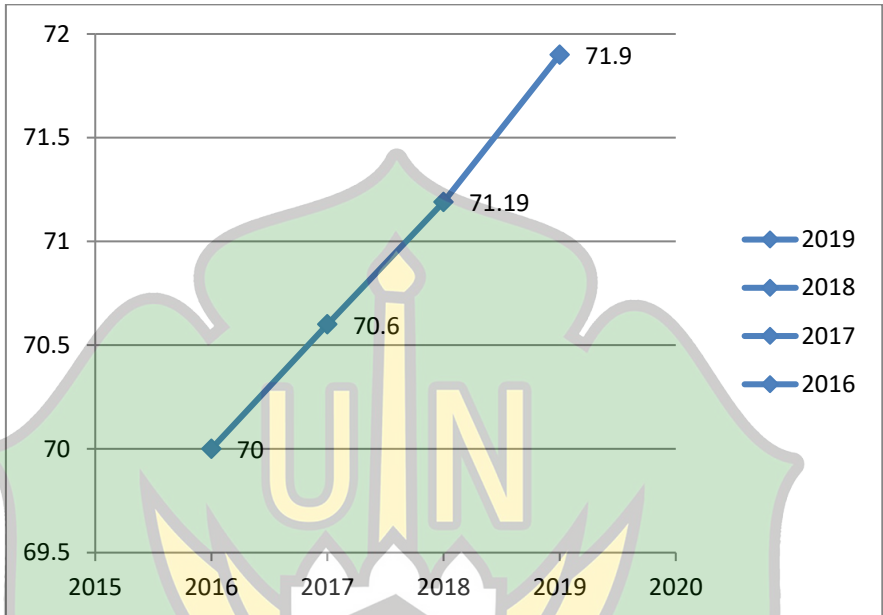
Untuk mengukur tingkat pemenuhan unsur diatas, BPS dalam metode baru menggunakan suatu indeks komposit berdasarkan pada empat indikator yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup berdasarkan rata-rata statistik, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, Rata-rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*: MYS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal, dan Purchasing Power Parity (PPP) adalah keseimbangan kemampuan berbelanja.

BPS dalam menghitung standar kehidupan layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson (BPS, 2009). Keempat indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan Indeks pembangunan Manusia. Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat dan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian dua hal tersebut akan meningkatkan produktivitas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti kehidupan yang layak.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, perlu disadari bahwa perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses yang tidak bisa diukur dalam waktu singkat dan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah (Sidik, 2020:1)

Data BPS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Aceh terus membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari IPM dan komponennya yang meningkat dari tahun 2016-2019. Secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam grafik tersebut.

**Gambar 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh, 2016-2019**



*Sumber: Data BPS (2022)*

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa capaian IPM Aceh tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya bahkan termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan tingginya komitmen pemerintah terhadap upaya pembangunan manusia terutama yang dicerminkan melalui tingginya anggaran di sektor publik sehingga dapat meningkatkan tingginya angka IPM. Namun, laju kenaikan angka IPM melambat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penelitian Maria (2021) tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Pendidikan, Kesehatan, dan

Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, dimana hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Provinsi se- Indonesia. Variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi se- Indonesia. sedangkan variabel pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Provinsi se- Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian diatas, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda yaitu di provinsi Aceh, perbedaan lainnya juga terletak pada periode penelitian yang dilakukan, dan hal yang paling menarik dalam penelitian ini yaitu membahas dari sudut pandang ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Periode 2016-2019 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di fungsi pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di fungsi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di fungsi ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaruh belanja pemerintah di fungsi pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh.
2. Untuk menjelaskan pengaruh belanja pemerintah di fungsi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh.
3. Untuk menjelaskan pengaruh belanja pemerintah di fungsi ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti dan Pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh belanja pemerintah difungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia dan sebagai pendalaman pemahaman materi yang didapatkan di perkuliahan dengan mengaplikasikannya pada penelitian ini.
2. Bagi Pemerintah Daerah, agar bisa menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk belanja pemerintah di fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada masyarakat yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang indeks pembangunan manusia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini lebih tersusun dan terarah, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II                    LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat kerangka teoritik yang berisikan teori-teori tentang indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, IPM dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian terkait, keterkaitan antar variabel dan memuat tentang penelitian terkait serta dijelaskan juga mengenai kerangka hipotesis penelitian.

## **BAB III                    METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan metode penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini meliputi uraian jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, operasional variabel, dan metode analisis data.

## **BAB IV                    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari analisa data dan pembahasan. Bagian ini meliputi statistik deskriptif dari data-data yang digunakan di dalam penelitian.

## **BAB V                    PENUTUP**

Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan akhir, dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan merupakan salah satu tujuan suatu Negara maupun wilayah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, social, budaya, hukum, dan lainnya. Salah satu pembangunan yang penting adalah pembangunan manusia yang dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga sebagai indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali periode 1990 oleh United Nations Development Program. Indeks pembangunan manusia mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi umat manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan yang cukup, kesehatan dan pendidikan yang memadai (Intan, 2016).

Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan hidup layak diukur dengan

pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*). Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat dengan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. (UNDP, 1995).

IPM kemudian disempurnakan oleh United Nation Development Programme (1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran “bobot” manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan nonfisik manusia. Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan pembangunan, keahlian dan ilmu pengetahuan (Subandi, 2014).

Indeks pembangunan manusia idealnya mencakup banyak variabel sehingga benar-benar dapat mencerminkan berbagai segi sesi kehidupan manusia yang sangat kompleks, namun ketersediaan data statistik membatasi hal tersebut. Pada awal penyusunannya pilihan diberikan pada tiga unsur penting/pilar utama/dimensi kehidupan manusia, harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator-indikator sebagai indeks tersebut harus dipilih dengan cermat agar dapat menangkap dengan baik berbagai dimensi pilihan-pilihan manusia. Sebagai ukuran kualitas hidup,

IPM di bangun melalui 3 pendekatan yaitu dimensi dasar yang mencakup antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan kehidupan layak (Joko, 2015).

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat secara parsial melalui besaran permasalahan yang dapat diatasi namun pencapaian pembangunan manusia secara parsial sebenarnya sangat bervariasi dimana terdapat beberapa aspek pembangunan yang berhasil sedangkan beberapa aspek lainnya justru gagal. Untuk melakukan pembangunan manusia tersebut maka menjadi tugas pemerintah yang bertanggungjawab sebagai pelaksananya yang dilakukan melalui berbagai kebijakan, berupa kebijakan fiskal yang instrumennya mengarah pada pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan yaitu pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan data pengeluaran pemerintah per kapita di fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tahun 2016-2019 dapat dikatakan bahwa dua kondisi yang saling sejalan yaitu tingginya komitmen pemerintah terhadap upaya pembangunan manusia terutama yang dicerminkan melalui tingginya anggaran di sektor publik dan tingginya angka IPM. Kenaikan pengeluaran pemerintah Aceh pada ketiga sektor tersebut belum sesuai ataupun seimbang dengan hasil yang diperoleh yaitu aspek dalam melihat keberhasilan pengeluaran tersebut.

## 2.2 Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan

Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Bastias, 2010).

Menurut Todaro (dalam Aini, 2008:20) pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu: meningkatnya secara umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan, Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja, memungkinkannya penyerapan informasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien, menghilangkan hambatan-hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi, beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam jangka panjang, dan meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas.

Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

### **2.3 Belanja Pemerintah Sektor Ekonomi**

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pemerintah memegang peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Keterlibatan langsung pemerintah terhadap sektor ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan realisasi anggaran yang dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energy, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan informatika, serta peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi (Sintong, 2018). Belanja fungsi ekonomi cukup dominan berpengaruh dalam pembangunan ekonomi yang diukur dengan daya beli masyarakat artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah sektor ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

## 2.4 Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Kuncoro, 2013). Manusia tidak akan dapat beraktifitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat terjaga dengan baik, sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah seperti mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai item seperti tenaga medis, obat-obatan, puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya.

Atmawikarta (2009) mengemukakan pendapat bahwa kesehatan akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat baik fisik maupun mental diasumsikan mempunyai penghasilan lebih tinggi karena mampu memanfaatkan kesehatannya untuk melakukan kegiatan produktif dalam jangka waktu yang lebih lama. Kondisi ini berlaku di kebanyakan Negara berkembang dimana tenaga kerja umumnya bekerja secara manual. Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan rendahnya produktivitas karena banyaknya hari kerja yang hilang karena sakit. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seorang individu. Oleh karena itu,

tingkat kesehatan yang rendah sangat rentan terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat.

Melihat pentingnya kesehatan terhadap modal manusia dan bagi kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini. Hal ini tercermin dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD.

## **2.5 Indeks Pembangunan Manusia Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT jauh sebelum manusia diciptakan diberikan kebebasan terbatas kepada manusia untuk memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan akal yang terdapat dalam diri manusia tersebut. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk mengelola sumber daya alam yang ada menggunakan akal yang juga diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. ”Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? ”Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al- Baqarah [2]: 30)*

Dari firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan pemimpin dimuka bumi ini, yang diberikan akal untuk memelihara dan melestarikan alam, menggali dan mengelola sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Islam memandang dalam suatu pembangunan bangsa yang perlu dibangun manusia itu sendiri, maka pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa melalui peningkatan pembangunan manusia itu sendiri (Febri, 2018).

Manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dari merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih, semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri, pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja. Sebagai khalifah Allah SWT, manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi Allah sebagaimana firman Allah:

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ  
 أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ  
 مُجِيبٌ

Artinya: “Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Salih. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do’a hamba-Nya).” (Q.S Hud [11]: 61)

Pembangunan manusia adalah pembangunan yang menyeluruh “at-tanmiyah asy-syumuliah”. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan yang berdasarkan konsep rabbani. Konsep yang tidak hanya terpaku kepada pembangunan aspek keduniaan dan materi saja, tetapi juga aspek ruhiyah dan akhirat. Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Konsep yang mengajak kepada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu tanpa melakukan kepentingan bersama. Konsep yang menolak keras pembangunan yang hanya mengkayakan sebagian golongan kecil dan memiskinkan golongan lainnya. Konsep yang menghadirkan rasa tanggung jawab. Keseimbangan dan keselarasan antara ruh dan jasad, antara ilmu dan akhlak akan melahirkan keberkahan yang dijanjikan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi jika mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S Al-A’raf [7]: 96)

Manusia sebagai makhluk yang berakal pasti akan mengamati sesuatu. Hasil pengamatan itu diolah menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diolah akan dirumuskan menjadi ilmu baru yang akan digunakannya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjangkau jauh diluar kemampuan fisiknya. Demikian banyak hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang membuat manusia dapat hidup menguasai alam ini dengan baik. Dalam Islam faktor manusia yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan. Islam memandang bahwa manusia memiliki 2 tugas utama, yaitu sebagai *Abdullah* (hamba Allah) dan *khalifatullah fil ardh* yaitu wakil Allah dimuka bumi yang bertugas memakmurkannya. Dengan pendidikan yang menyeluruh lah manusia mampu mengelolanya dengan baik termasuk dalam mengelola pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu lainnya.

Pembangunan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam Islam yaitu menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar

sebagai prioritas utama demi memelihara lima maslahat pokok yaitu:

a) Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*)

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama atau kepercayaan akan menghasilkan tata nilai guna menopang kehidupan. Tanpa agama manusia tidak akan berguna, bahkan agama adalah kebutuhan paling penting dari semua kebutuhan pokok. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Karena itu dalam Al-Quran & Hadits manusia dianjurkan untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah (Bahsoan, 2011).

b) Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Manusia diciptakan Tuhan di muka bumi tidak lain adalah untuk menjadi khalifah. Tugas utama khalifah adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan dalam pembahasan ini sama pengertiannya dengan pembangunan. Sementara itu, pembangunan sangat bergantung pada kualitas manusia itu sendiri, atau menurut Ibnu Khaldun “bangkit dan runtuhnya suatu peradaban tergantung kualitas manusia. Sehingga pembangunan yang berlandaskan prinsip *maqashid syariah* seharusnya mengutamakan keselamatan hidup manusia dan

Pembangunan harus mengutamakan ketersediaannya kebutuhan hidup. Karena esensi *maqasid syariah* bukan hanya pembangunan fisik yang dihitung dengan tingkat PDB maupun angka pendapatan per kapita, tetapi lebih mengutamakan kualitas hidup manusia (Jajang, 2021).

c) Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Perlindungan terhadap akal menjadi alat pengganda kualitas hidup manusia. Sejatinya manusia tidak memiliki instrument alami untuk mempertahankan hidupnya. Manusia tidak seperti macan yang diberi kecepatan berlari dan taring yang kuat untuk memangsa. Jerapah diberi leher yang panjang karena kebutuhannya terhadap daun yang muda. Manusia hanya diberi akal sebagai bekal untuk mempertahankan diri. Hal ini menjadi alasan mengapa syariah harus menjaga akal. Menjaga dalam konteks ini berarti mengembangkan akal dan salah satu caranya adalah melalui pendidikan yang baik (Jajang, 2021).

d) Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk mempertahankan kelangsungan generasinya, makhluk hidup

secara kodrati melakukan proses reproduksi untuk melahirkan generasi baru menggantikan generasi lama atau menambah jumlah populasi dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan, keturunan ini sangat memiliki peran vital terutama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan berkelanjutan (Jajang, 2021).

e) Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Pada hakikatnya harta benda adalah milik Allah Swt namun Islam mengakui hak individu seseorang. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem dasar ekonomi atas dasar keadilan dan kerelaan, karena menjamin ketersediaan harta adalah tujuan utama pembangunan karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik (Jajang, 2021).

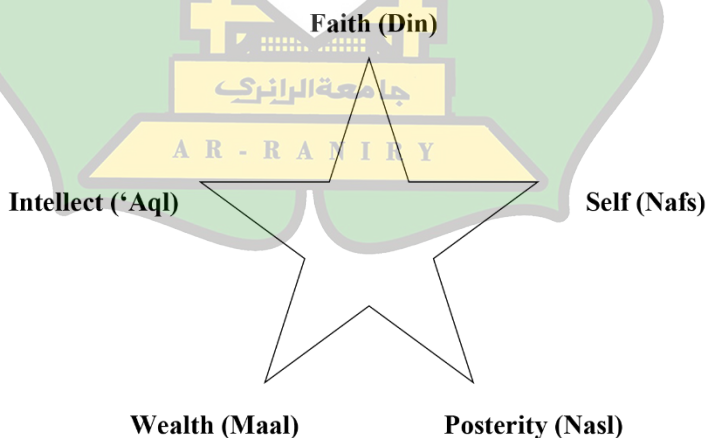
Jadi, kemaslahatan harta itu ketika harta bisa disalurkan kepada yang berhak untuk membangun akal pendidikan. Maka seharusnya belanja pemerintah harus mengikuti prosedur itu. Jika belanja pemerintah tidak berpengaruh secara sempurna maka terjadinya masalah ketidakstabilan dalam sistemnya.

Hubungan kelima aspek ini dengan pusat pembangunan dan kesejahteraan manusia digambarkan oleh Chapra pada gambar 2.1. pada gambar tersebut terlihat bahwa pembangunan

manusia dan kesejahteraan semesta dipengaruhi oleh dimensi maqasid syariah dimana antar dimensi ini saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Pembangunan manusia dan kesejahteraan dimodelkan oleh lima komponen maqasid syariah. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh seberapa besar lima komponen maqasid syariah dapat dipenuhi. Selain itu model ini juga menggambarkan bahwa antara lima komponen bersifat saling mempengaruhi atau independen satu sama lain.

Lebih jelas Chapra juga menggambarkan bagaimana kelima dimensi maqasid syariah tersebut dalam hubungan interdependensi membentuk suatu keutuhan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1

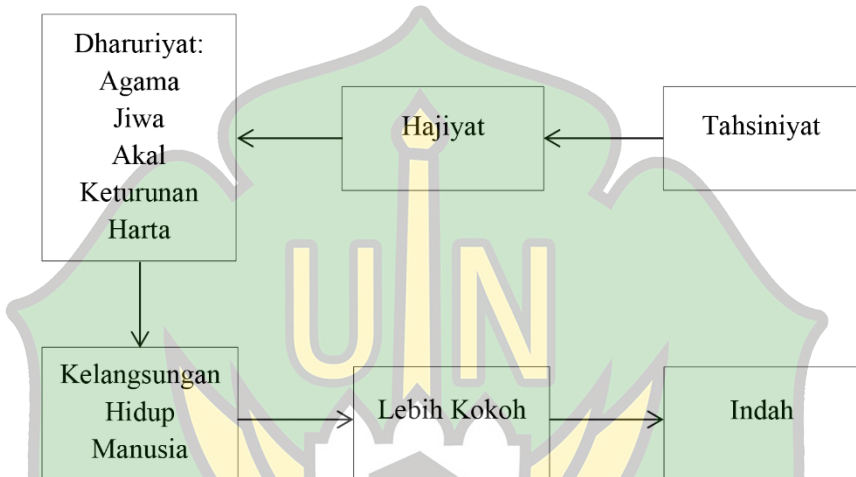
**Gambar 2.1**  
**Satu Kesatuan Dimensi Maqashid Syariah**  
*Human Well-Being: The Light of Maqashid al- Syariah*



*Sumber: Chapra (2008)*

Sedangkan tingkat kemaslahatan yaitu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dharuriyat, hijiyat dan tahsiniyat. Ketiga tingkatan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2.2**  
**Jenjang Kebutuhan Manusia**



Sumber: Bahsoan (2011)

### 1. **Dharuriyat (Primer)**

*Dharuriyat (Primer)* adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Macam-macam kebutuhan ini meliputi, *Hifz din* (menjaga agama), *Hifz nafs* (menjaga jiwa), *Hifz 'aql* (menjaga akal), *Hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz maal* (menjaga harta). (Subagiyo, 2016) untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syariat Islam diturunkan.

Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah: 179 dan 193 sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “... Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 179)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 193)

Oleh sebab itu, tujuan yang bersifat dharuri adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi dan kelimanya harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

## 2. *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan hidup umat manusia,

namun manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya adalah untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang *hajiyat* ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

### 3. *Tahsiniyat* (Tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz 'aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), serta *hifz maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan *hajiyat* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.

Setiap individu berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya. (A. Rama & Makhilani, 2013) agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai

pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.

Islam tidak seperti agama yang lainnya, dimana Islam secara tegas memberikan pedoman tentang ekonomi secara rinci untuk menciptakan sistem yang baik dan tidak merugikan orang lain. Ekonomi Islam secara komprehensif dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara adil adalah elemen dasar dari sistem ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan strategi dan mencegah faktor-faktor penghambat untuk kemajuan perekonomian dengan adil (Inayah, 2021).

Tujuan Islam sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat. Karena manusia di dunia ini diutus oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh, yaitu menjaga alam semesta dengan sebaik mungkin. Jadi kesejahteraan tersebut dapat dibantu dengan adanya bahan makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Dengan begitu manusia harus berperilaku baik terhadap lingkungan sekitar. Agama Islam sudah mempunyai aturan yang jelas dan tepat yang lebih eksplisit dari Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dimana dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip-prinsip, regulasi, aturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti misalkan aturan pembangunan, perpajakan, hak individu dan struktur ekonomi (Inayah, 2021).

Indonesia adalah mayoritas penduduk muslim. Sangat disayangkan jika penduduk Indonesia tidak bergelar Negara yang sejahtera. Jadi kesejahteraan tersebut dapat dibantu dengan adanya bahan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu untuk menciptakan keadilan di suatu Negara, maka pemerintah seharusnya memperhatikan pembangunan perekonomian secara Islam sesuai dengan prinsip syariah, karena Islam mengatur bahwa sistem itu harus bersifat keadilan bagi seluruh rakyat. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pembangunan manusia tidak diukur dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang bersifat duniawi melainkan juga bekal untuk akhirat kelak.

## **2.6 Konsep Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah pada barang-barang modal, barang konsumsi dan pada jasa-jasa (Sukirno, 2010). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah

meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu periode anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan harus memperhitungkan siapa yang akan dipekerjakan atau meningkat pendapatannya (Dumairy, 1996:161).

Pengeluaran daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu;

Pertama, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pengeluaran pegawai, pengeluaran barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1996).

Kedua, pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Putri, 2011). Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai urusan sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui dua sisi yaitu sisi mikro dan makro. Secara mikro, pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Permintaan dan penawaran untuk publik menentukan banyaknya barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah melalui anggaran belanja. Belanja publik tersebut akhirnya akan menimbulkan permintaan barang pada sektor swasta (Basri dan Mulyadi, 2005:60). Secara makro, pengeluaran

pemerintah telah dikembangkan oleh beberapa ahli menurut Basri dan Mulyadi (2005:53) yaitu:

1. Rostow dan Musgrave Pengeluaran pemerintah berdasarkan beberapa tahap-tahap pembangunan ekonomi yang terdiri dari tahap awal dimana total pengeluaran pemerintah besar karena digunakan untuk membiayai investasi awal; tahap menengah dimana peran investasi swasta makin besar sehingga menimbulkan kegagalan pasar sehingga pemerintah harus menyediakan barang publik yang lebih banyak; dan tahap lanjut dimana pengeluaran difokuskan untuk kegiatan sosial.
2. Hukum Wagner Pengeluaran pemerintah berdasarkan pendapatan perkapita, yaitu apabila pendapatan perkapita naik maka pengeluaran pemerintah naik. Namun kelemahan hukum ini adalah tidak didasarkan pada teori mengenai barang-barang publik, pemerintah dianggap sebagai individu yang bebas bertindak.
3. Teori Peacock & Wiseman Pengeluaran pemerintah berdasarkan usaha untuk memperbesar pengeluaran dan wajib bayar pajak lebih besar bagi masyarakat untuk berbagai fasilitas yang digunakan.

## **2.7 Pengeluaran Pemerintah Dalam Perspektif Islam**

Pemerintah dalam pandangan islam merupakan pihak yang wajib mengatur dan mengalokasikan dana yang didapatkan dari sumber daya alam dan pajak pada negaranya. Kebijakan

Pemerintah di Indonesia mengalokasikan pendapatannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau biasa disingkat dengan APBN. Alokasi itu dikelola dan diatur secara terencana oleh pemerintah sehingga dana yang ada akan berpengaruh pada kemakmuran seluruh rakyatnya. Jika pada masa Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Namun hal ini akan berbeda dengan masa khalifah pada umumnya. Dalam sejarah banyak sekali riwayat menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh khulafaur rashidin selalu mengedepankan kemakmuran dan distribusi yang merata kepada seluruh rakyatnya. Salah satunya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal secara umum adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian yang ada pada sebuah negara. Dalam Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang dan merata. Sebagaimana yang kita tahu bahwa fungsi sebuah negara adalah untuk mengatur dan menjembatani interaksi-interaksi

manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itulah kebijakan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal akan sangat mempengaruhi kesejahteraan dalam sebuah Negara.

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi islam, serta dijadikan kaidah rasionalitas bagi pengeluaran negara.

Kegiatan yang menambah pengeluaran Negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci alquran telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan Negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Al-quran telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat. Dalam al-quran dikatakan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah

*Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Q.S Al-Baqarah [2]: 219)*

ini bukan berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang dikalangan semua masyarakat. Hal ini terutama dikalangan fakir miskin sesuai dengan hak-hak alami serta hak-hak milik benda pribadi. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini yaitu melalui pendidikan, Ilmu pengetahuan dan islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Kemajuan peradaban islam pada masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7M-13M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu begitu banyak ayat alquran yang membicarakan akan keutamaan ilmu. Firman Allah:

أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آنَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ  
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan

*rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran”. (Q.S Az-Zumar [39]: 9)*

## **2.8 Penelitian Terkait**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia antara lain;

Puji Lestari, Dhiah Fitrayati (2011) meneliti tentang pengaruh belanja pemerintah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Kediri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan perkembangan belanja pemerintah di kota Kediri tahun 2002 sampai dengan tahun 2011, kemudian menghubungkan indeks perkembangan manusia tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Kediri.

Nadia Ayu Bhakti (2012), melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, APBD untuk Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di 33

provinsi di Indonesia. Karena struktur alokasi APBD Pendidikan belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan pembangunan. Sedangkan untuk sektor Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. Pemerintah telah menyediakan akses pelayanan, dalam konteks pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin.

Sugiarto A. Santoso, dkk (2013) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah kabupaten/kota sektor Kesehatan dan pendidikan terhadap IPM di Aceh, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di sektor pendidikan dan kesehatan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap nilai indeks pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Aceh. Kedua variabel bebas tersebut terbukti dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang sangat meyakinkan.

Intan Safitri (2016) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto (2016) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Kutai Timur. Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten Kutai Timur.

Akbar (2016), melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan social terhadap indeks pembangunan manusia di Yogyakarta 2008-2014, dimana hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara parsial atau individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Variable pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara parsial atau individual tidak berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia sedangkan variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur secara parsial atau individual tidak

berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia di Provinsi D. I Yogyakarta.

Sunarni (2017), melakukan penelitian dengan judul pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Indonesia. Hasil analisis secara statistik dan komprehensif berdasarkan fakta empiris adalah realisasi belanja daerah menurut fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan merupakan investasi yang utama dalam mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, realisasi belanja daerah menurut fungsi Kesehatan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota di Indonesia. Dan menurut fungsi ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti bahwa realisasi belanja fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi berkontribusi dalam peningkatan perekonomian dan meningkatkan IPM kabupaten/kota di Indonesia.

Hanafi, T. Zulham (2019) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Aceh Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran sektor pendidikan mempengaruhi

secara positif kepada indeks pembangunan manusia di Aceh Selatan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

| No | Nama Peneliti dan Tahun               | Judul Penelitian                                                                                       | Metode Penelitian      | Persamaan                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Puji Lestari & Dhiah Fitrayati (2011) | Pengaruh Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri | Deskriptif Kuantitatif | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Variabel terikat pada penelitian sebelumnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini variabel terikat adalah IPM.                                            |
| 2. | Nadia Ayu Bakhti (2012)               | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012     | Penelitian asosiatif   | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

| No | Nama Peneliti dan Tahun         | Judul Penelitian                                                                                                                     | Metode Penelitian      | Persamaan                                                               | Perbedaan                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Sugiarto A. Santoso, dkk (2013) | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kab/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap IPM di Aceh                                        | Deskriptif Kuantitatif | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Penelitian sebelumnya hanya meneliti variabel kesehatan dan pendidikan. Sedangkan penelitian ini menambah variabel ekonomi dalam penelitiannya. |
| 4. | Intan safitri (2016)            | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh | Deskriptif Kuantitatif | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Penelitian sebelumnya meneliti tentang variabel infrastruktur. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang variabel ekonomi.                 |
| 5. | Merang Kahang, dkk (2016)       | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur         | Deskriptif Kuantitatif | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan variabel ekonomi                                                                               |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

| No  | Nama Peneliti dan Tahun   | Judul Penelitian                                                                                                                                                           | Metode Penelitian      | Persamaan                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.. | Akbar (2016)              | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Deskriptif Kuantitatif | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Penelitian sebelumnya meneliti tentang 4 variabel yaitu variabel pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bansos. Sedangkan pada penelitian ini hanya meneliti pada 3 variabel yaitu variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. |
| 7.  | Sunarni (2017)            | Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Indonesia                                                                                 | Deskriptif Kuantitatif | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Perbedaannya terletak pada Lokasi Penelitian dan Belanja Daerah Per Fungsi                                                                                                                                                         |
| 8.  | Hanafi & T. Zulham (2019) | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Selatan                                                            | Deskriptif Kuantitatif | Persamaannya: terletak pada objek penelitian yaitu meneliti tentang IPM | Penelitian sebelumnya hanya meneliti pada 1 kabuapten saja yaitu kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan pada penelitian ini meneliti pada 23 kab/kota di Aceh berdasarkan data                                                          |

Sumber: Data diolah (2022)

Dari beberapa temuan penelitian terkait, perbedaan di dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu di provinsi Aceh dalam 23 kab/kota, periode penelitian yang diambil dari tahun 2016-2019, dan terdapat tiga variabel bebas yaitu fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di 23 kab/kota di Aceh pada periode waktu tertentu dan membahas dari sudut pandang ekonomi Islam.

## **2.9 Keterkaitan Antar Variabel**

### **2.9.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut Astri, dkk (2013) tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, dimana setiap perubahan pada pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan akan diikuti perubahan IPM. Asri dkk menegaskan bahwa pentingnya pembiayaan bagi perbaikan kualitas manusia yang merupakan investasi modal manusia untuk memperbaiki kesejahteraan melalui perbaikan pengeluaran sektor pendidikan.

Pemerintah sebagai pihak yang bertugas untuk mensejahterahkan rakyat punya peran dalam pembangunan manusia. Upaya pemerintah dalam pembangunan manusia melalui kebijakan yang tercermin dalam pengeluaran pemerintah.

Pemerintah berwenang untuk mengatur barang dan jasa publik dan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan publik. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas manusia tercermin dalam pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk perbaikan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sebagai negara yang telah menerapkan sistem otonomi daerah maka kebijakan fiskal untuk pembangunan daerah juga menjadi kewenangan daerah/regional. Teori Dornbusch & Fisher dalam Manik dan Hidayat (2010) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempengaruhi jalannya ekonomi.

Melalui berkembangnya pengetahuan masyarakat, maka manusia sebagai individu yang melakukan proses pembelajaran kualitasnya akan meningkat sehingga membantu dalam upaya pembangunan manusia. Semakin besar upaya pemerintah dalam pengembangan bidang pendidikan yang direalisasikan melalui pengeluaran pemerintah maka semakin besar upaya pembangunan manusia di daerah tersebut. Sehingga pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari upaya pembangunan manusia suatu daerah.

Menurut Setiawan (2006), kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan digunakan untuk membangun,

memelihara, dan meningkatkan sarana serta prasarana kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini tercermin dalam naiknya angka harapan hidup, turunnya nilai kematian bayi, turunnya angka kematian ibu melahirkan, dll. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hubungan ini diperkuat dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan salah satunya Suparno (2014), di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) akan tetapi hanya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kalimantan Timur.

Belanja ekonomi merupakan salah satu belanja pembangunan, yang pengeluarannya bertujuan untuk pembiayaan proses perubahan dan bersifat menambah modal masyarakat baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah ekonomi yang diukur dengan daya beli masyarakat artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah sektor ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Menurut Ana (2017) realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota

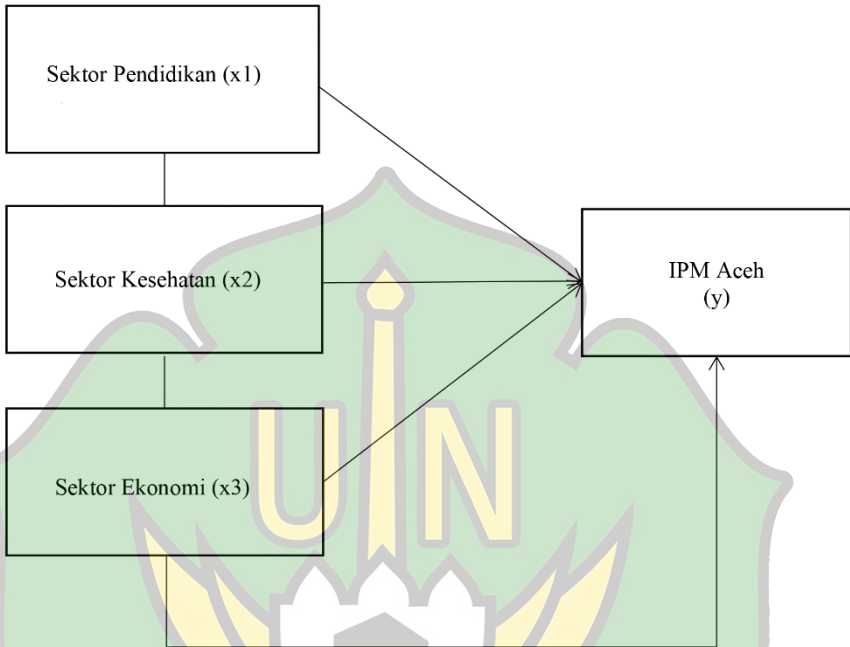
di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti bahwa realisasi belanja fungsi ekonomi berkontribusi dalam peningkatan perekonomian dan peningkatan masyarakat atas pendapatan dan akan mempengaruhi kemakmuran. Sehingga dapat meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.

Hal ini juga didukung Musgrave (2012) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu perpindahan sumber daya, distribusi pendapatan, dan pemisahan terhadap output. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu ekonomi.

## **2.10 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka landasan pemikirannya adalah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

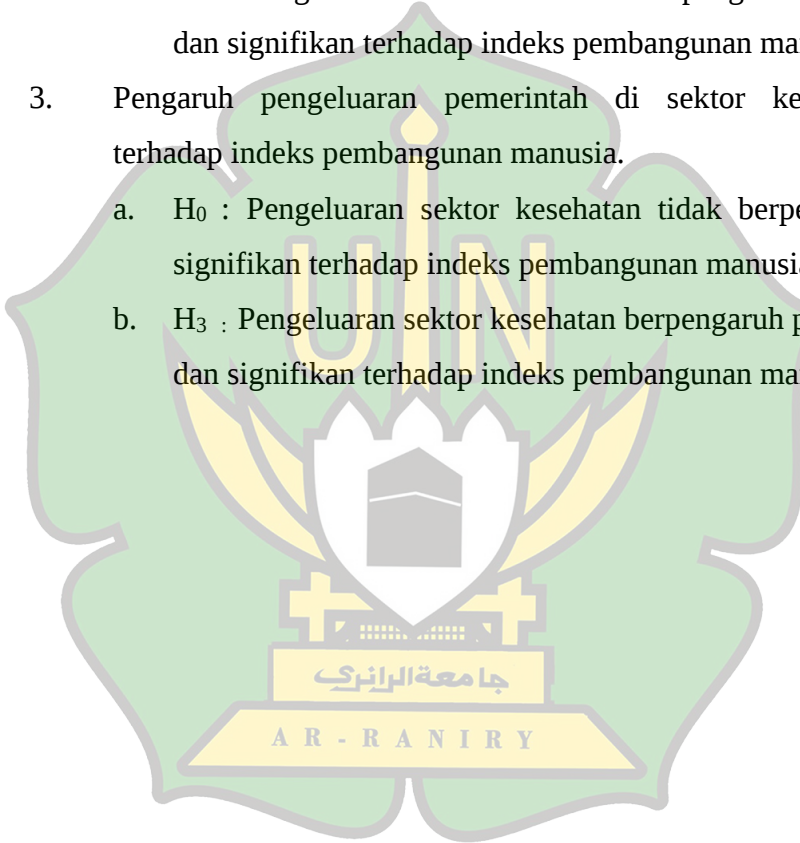


### **2.11 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, temuan penelitian terkait, dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia.
  - a.  $H_0$  : Pengeluaran sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
  - b.  $H_1$  : Pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia.
  - a.  $H_0$  : Pengeluaran sektor ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
  - b.  $H_2$  : Pengeluaran sektor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.
  - a.  $H_0$  : Pengeluaran sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
  - b.  $H_3$  : Pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber data**

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 23 kabupaten/kota di Aceh dengan periode waktu 2016-2019 ( $n=92$ ). Jenis data yang digunakan adalah data runtun waktu “*time series*” tahunan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Aceh. Selain itu untuk mendukung penelitian, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan dan eksplorasi dengan pokok pembahasan yang dikutip dari buku, catatan, atau laporan yang telah tersusun.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

#### **1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia di Aceh. Data indeks pembangunan manusia yang akan diteliti adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak BPS Aceh yang diambil dari tahun 2016-2019.

#### **2. Variabel Bebas (Variabel independen)**

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi di Aceh yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Aceh dari tahun 2016-2019.

### **3.4 Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia (Y), adalah indeks pembangunan manusia kab/kota tertentu dalam periode waktu tertentu diukur dengan satuan angka indeks. pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ( $X_1$ ) adalah realisasi belanja pendidikan di daerah

tertentu dalam periode tahun tertentu dihitung dalam satuan rupiah perkapita. pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ( $X_2$ ) adalah realisasi belanja kesehatan di daerah tertentu dalam periode tahun tertentu dihitung dalam satuan rupiah perkapita. dan pengeluaran pemerintah sektor ekonomi ( $X_3$ ) adalah realisasi belanja ekonomi di daerah tertentu dalam periode tahun tertentu dihitung dalam satuan rupiah perkapita.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Dimana variabel terikat adalah indeks pembangunan manusia (IPM) dan variabel bebas adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor ekonomi.

#### **3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2016-2019, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel. Analisis berganda adalah suatu teknik untuk menganalisis

hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Sedangkan data panel yaitu gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda.

Berdasarkan kerangka konseptual, maka bentuk persamaan yang disusun yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Dimana:

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Y         | = Indeks Pembangunan Manusia                     |
| X1        | = Alokasi Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan   |
| X2        | = Alokasi Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan    |
| X3        | = Alokasi Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi      |
| a         | = Konstanta Umum                                 |
| b (1...3) | = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas |
| e         | = variabel pengganggu                            |

### 3.5.2 Metode Estimasi Data Panel

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

#### 1. Common Effect Model

Pendekatan ini merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Model ini mengabaikan dimensi

waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data selalu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS).

## 2. Fixed Effect Model

Metode ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel, Fixed Effect Model menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar data. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variabel (LSDV). Metode fixed effect dapat mengatasi hal tersebut karena metode ini memungkinkan adanya perubahan pada setiap  $I$  dan  $t$ . pada dasarnya model fixed effect adalah sama dengan regresi yang menggunakan dummy variabel sebagai variable bebas, sehingga dapat diestimasi dengan model OLS. Oleh sebab itu, model ini juga sering disebut sebagai model Least Square Dummy Variable.

## 3. Random Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana ada kemungkinan variabel pengganggu saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga

disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Feasible Generalized Least Square (FGLS). Dapat dinyatakan bahwa model random effect menganggap efek rata-rata dari data cross section dan time series dipresentasikan dalam intersep.

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah faktor pengganggu berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas digunakan uji Histogram. Untuk melihat apakah data telah berdistribusi normal dengan cara K- STest, maka kriteria yang harus dipenuhi adalah nilai Asymp. Sig, (2 tailed) lebih kecil dari 0.05 hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variabel independen di antara satu sama lainnya. Nilai toleransi dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih dari 0.10 atau nilai VIF kurang dari 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Varian yang tetap pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain disebut homoskedastisitas, sedangkan yang berubah disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homoskedastisitas. Uji yang digunakan adalah *Breusch Pagan Godfrey*. Model dinyatakan bebas masalah heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi masing-masing variabel pada hasil regresi  $> 0.05$ , sedangkan apabila probabilitas signifikansi masing-masing variabel  $< 0.05$ , maka model ini mengalami masalah heteroskedastisitas.

### 4. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi, metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW).

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui 2 uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji secara serempak (F- test), dan uji secara parsial (t- test) dalam menentukan diterima atau ditolaknya  $H_0$ .

#### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur besarnya variasi perubahan variabel terikat yang dijelaskan oleh semua variabel bebas. Semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat, maka nilai  $R$  akan semakin besar. Nilai koefisien determinasi ini terletak diantara 0 dan 1 ( $0 < R < 1$ ), dimana semakin tinggi nilai  $R$  suatu regresi (mendekati 1), maka hasil regresi tersebut akan semakin baik.

#### 2. Uji Signifikansi (Uji Statistik F)

Secara simultan (Uji Statistik F) Uji F ini dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan  $F < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa variabel dependen secara simultan mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji Simultan F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen

terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali,2016):

1. Jika nilai signifikan  $F < 0.05$  maka  $H^0$  ditolak dan  $H^1$  diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan  $F > 0.05$  maka  $H^0$  diterima dan  $H^1$  ditolak. Artinya semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak. Dalam melakukan uji t ini dapat dilakukan dengan cara melihat p-value dari masing-masing variabel bebas. Apabila p-value masing-masing variabel bebas lebih kecil dibandingkan dengan 0.05 ( $p\text{-value} < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, apabila  $p\text{-value} > 0.05$ , berarti bahwa masing-masing variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Aceh**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Secara geografis, Provinsi Aceh terletak antara  $01^{\circ} 58' 37,2''$  –  $06^{\circ} 04' 33,6''$  Lintang Utara dan  $94^{\circ} 57' 57,6''$  –  $98^{\circ} 17' 13,2''$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut.

**Gambar 4.1**  
**Peta Aceh**



*Sumber : Aceh Dalam Angka (2021)*

Pada tahun 2013 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa. Luas Provinsi Aceh 5.677.081ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 ha. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri dari 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### 4.1.2 Daerah di Aceh

Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kabupaten Atau Kota dan Ibukota di Aceh**

| No | Kabupaten/Kota | Ibukota   |
|----|----------------|-----------|
| 1. | Simelue        | Sinabang  |
| 2. | Aceh Singkil   | Singkil   |
| 3. | Aceh Selatan   | Tapaktuan |
| 4. | Aceh Tenggara  | Kutacane  |
| 5. | Aceh Timur     | Idi       |
| 6. | Aceh Tengah    | Takengon  |
| 7. | Aceh Barat     | Meulaboh  |
| 8. | Aceh Besar     | Jantho    |

**Tabel 4.1-Lanjutan**

| No  | Kabupaten/Kota    | Ibukota               |
|-----|-------------------|-----------------------|
| 9.  | Pidie             | Sigli                 |
| 10. | Bireun            | Bireun                |
| 11. | Aceh Utara        | Lhoksukon             |
| 12. | Aceh Barat Daya   | Blangpidie            |
| 13. | Gayo Lues         | Blangkejren           |
| 14. | Aceh Tamiang      | Karang Baru           |
| 15. | Nagan Raya        | Suka Makmue           |
| 16. | Aceh Jaya         | Calang                |
| 17. | Bener Meriah      | Simpang Tiga Redelong |
| 18. | Pidie Jaya        | Meredue               |
| 19. | Kota Banda Aceh   | Banda Aceh            |
| 20. | Kota Sabang       | Sabang                |
| 21. | Kota Langsa       | Langsa                |
| 22. | Kota Lhokseumawe  | Lhokseumawe           |
| 23. | Kota Subulussalam | Subulussalam          |

Sumber: Aceh Dalam Angka (2021)

Adapun pembagian jumlah kecamatan dan jumlah desa atau kelurahan pada kabupaten atau kota di Aceh adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pembagian Wilayah di Aceh**

| No  | Kabupaten/Kota | 2021             |                       |
|-----|----------------|------------------|-----------------------|
|     |                | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
| 1.  | Simelue        | 10               | 138                   |
| 2.  | Aceh Singkil   | 11               | 116                   |
| 3.  | Aceh Selatan   | 18               | 260                   |
| 4.  | Aceh Tenggara  | 16               | 385                   |
| 5.  | Aceh Timur     | 24               | 513                   |
| 6.  | Aceh Tengah    | 14               | 295                   |
| 7.  | Aceh Barat     | 12               | 322                   |
| 8.  | Aceh Besar     | 23               | 604                   |
| 9.  | Pidie          | 23               | 727                   |
| 10. | Bireun         | 17               | 609                   |
| 11. | Aceh Utara     | 27               | 852                   |

**Tabel 4.2-Lanjutan**

|               |                   |            |              |
|---------------|-------------------|------------|--------------|
| 12.           | Aceh Barat Daya   | 9          | 132          |
| 13.           | Gayo Lues         | 11         | 136          |
| 14.           | Aceh Tamiang      | 12         | 213          |
| 15.           | Nagan Raya        | 10         | 222          |
| 16.           | Aceh Jaya         | 9          | 172          |
| 17.           | Bener Meriah      | 10         | 232          |
| 18.           | Pidie Jaya        | 8          | 222          |
| 19.           | Kota Banda Aceh   | 9          | 90           |
| 20.           | Kota Sabang       | 2          | 18           |
| 21.           | Kota Langsa       | 5          | 66           |
| 22.           | Kota Lhokseumawe  | 4          | 68           |
| 23.           | Kota Subulussalam | 5          | 82           |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>289</b> | <b>6.474</b> |

*Sumber : Aceh Dalam Angka (2021)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak terletak pada Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 27 Kecamatan dan 852 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan paling sedikit terletak pada Kota Sabang dengan 2 Kecamatan dan 18 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2021.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Statistik Deskriptif**

Pada penelitian ini statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu data secara statistik yang merujuk pada nilai rata-rata, simpangan baku (*standard deviation*), nilai minimal dan nilai maksimal dari semua variabel baik dari variabel X yaitu sektor pendidikan ( $X_1$ ), sektor kesehatan ( $X_2$ ) dan sektor ekonomi ( $X_3$ )

maupun variabel Y yaitu indeks pembangunan manusia, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Deskripsi Variabel**

| Variabel                       | N  | Min   | Max   | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|
| Sektor pendidikan ( $X_1$ )    | 92 | 12,12 | 15,26 | 14,19 | 0,39           |
| Sektor kesehatan ( $X_2$ )     | 92 | 11,10 | 15,05 | 13,69 | 0,63           |
| Sektor ekonomi ( $X_3$ )       | 92 | 10,94 | 14,50 | 12,88 | 0,69           |
| Indeks Pembangunan Manusia (Y) | 92 | 4,12  | 4,44  | 4,24  | 0,06           |

Sumber : Data diolah (2022)

Pada tabel diatas menjelaskan tentang statistik deskriptif pada setiap variabel yang terlibat pada penelitian ini:

Pada variabel sektor pendidikan ( $X_1$ ) dapat diketahui bahwa jumlah data pada variabel ini adalah 92 dengan nilai minimumnya sebesar 12,12, nilai maksimumnya sebesar 15,26 dengan nilai rata-rata 14,19, sedangkan nilai standar deviasi bernilai 0,39. Pada variabel ini membuktikan bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi dan memperlihatkan bahwa hal tersebut sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebarkan bias pada data.

Pada variabel sektor kesehatan ( $X_2$ ) dapat diketahui bahwa jumlah data pada variabel ini adalah 92 dengan nilai minimumnya sebesar 11,10, nilai maksimumnya sebesar 15,05 dengan nilai rata-

rata 13,69, sedangkan nilai standar deviasi bernilai 0,63. Pada variabel ini membuktikan bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi dan memperlihatkan bahwa hal tersebut sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebarkan bias pada data.

Pada variabel sektor ekonomi ( $X_3$ ) dapat diketahui bahwa jumlah data pada variabel ini adalah 92 dengan nilai minimumnya sebesar 10,94, nilai maksimumnya sebesar 14,50 dengan nilai rata-rata 12,88, sedangkan nilai standar deviasi bernilai 0,69. Pada variabel ini membuktikan bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi dan memperlihatkan bahwa hal tersebut sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebarkan bias pada data.

Pada variabel indeks pembangunan manusia (Y) dapat diketahui bahwa jumlah data pada variabel ini adalah 92 dengan nilai minimumnya sebesar 4,12, nilai maksimumnya sebesar 4,44 dengan nilai rata-rata 4,24, sedangkan nilai standar deviasi bernilai 0,06. Pada variabel ini membuktikan bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi dan memperlihatkan bahwa hal tersebut sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki penyimpangan yang sangat tinggi

sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebarkan bias pada data.

**4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Regresi data panel dilakukan menggunakan salah satu diantara tiga model, yaitu *Pooled/Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE). Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga yang tersedia.

**4.1.2.1 Chow Test**

*Chow test* digunakan untuk memilih antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Setelah hasil dari model *Common Effect* dan *Fixed Effect* diperoleh, selanjutnya dihitung nilai statistik *Chow test*. Pengujian ini dibutuhkan untuk memilih model yang paling tepat diantara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Hasil dari *Chow test* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Chow**

| Effects Test             | Statistic  | d.f.    | Prob.  |
|--------------------------|------------|---------|--------|
| Cross-section F          | 79.967258  | (22,66) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 305.424706 | 22      | 0.0000 |

*Sumber : Data diolah (2022)*

Dalam melakukan *Chow test*, hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0$ : *Common Effect*

$H_1$ : *Fixed Effect*

Apabila nilai probabilitas  $F > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect*. Namun jika nilai probabilitas  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect*. Hasil dari *Chow test* pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* adalah sebesar 0,0000 atau  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu, model yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Selanjutnya akan dilakukan *Hausman test* untuk memilih antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

#### 4.1.2.2 *Hausman Test*

*Hausman test* dilakukan untuk menguji manakah model yang lebih tepat antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hasil dari *Hausman test* adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5**

**Uji Hausman**

| Test Summary         | Chi-Sq.<br>Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 20.870664            | 3            | 0.0001 |

Sumber : Data diolah (2022)

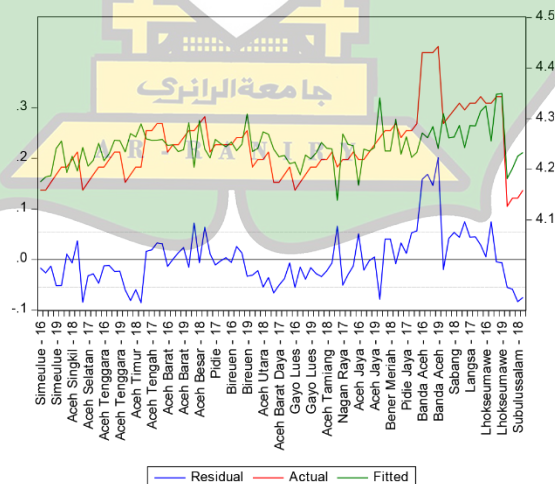
Apabila nilai probabilitas *Chi-Square*  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti model regresi yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect*. Namun jika probabilitas *Chi-Square*  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti model regresi yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil *Hausman test*

pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 0,0001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Karena *Fixed Effect Model* (FEM) telah terpilih sebanyak dua kali, maka disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel penelitian ini adalah *Fixed effect Model* (FEM).

#### 4.1.2.3 Penentuan Model Berdasarkan Residual

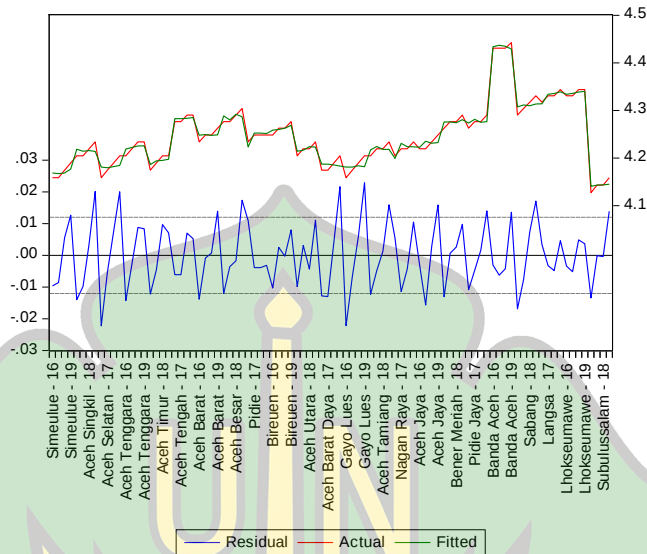
Selain dengan menggunakan uji chow dan uji residual penentuan model pada data panel juga dapat dilihat berdasarkan residual dari setiap variabel. Penentuan model berdasarkan perbandingan residual dapat ditentukan dari grafik fluktuasi *fitted line* (hasil estimasi) lebih mendekati data yang sebenarnya (*actual line*), adapun grafik residual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Residual Pada Model Common Effect**



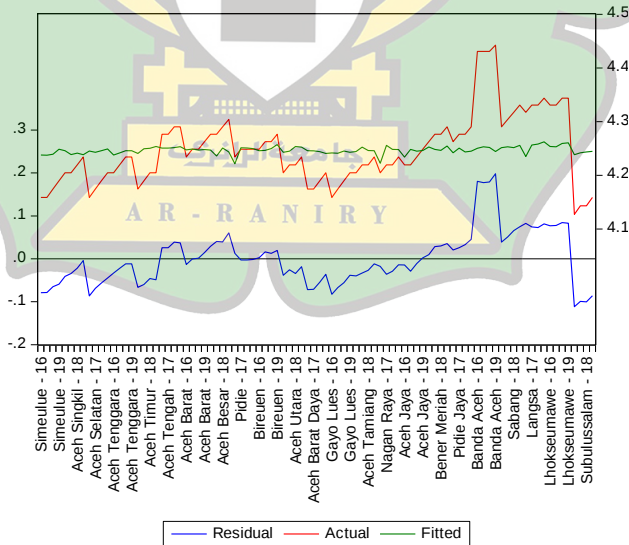
Sumber: Data diolah (2022)

**Gambar 4.3**  
**Residual Pada Model Fixed effect**



*Sumber: Data diolah (2022)*

**Gambar 4.4**  
**Residual Pada Random Effect**



*Sumber: Data diolah (2022)*

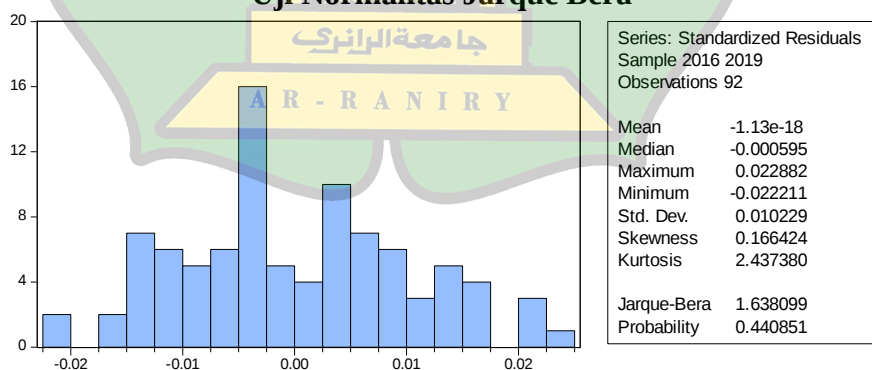
Dilihat bahwa di antara ketiga grafik tersebut, residual estimasi paling kecil ditunjukkan oleh pendekatan *fixed-effect*. Pada grafik tersebut terlihat bahwa fluktuasi *fitted line* (hasil estimasi), lebih mendekati data yang sebenarnya (*actual line*). Dengan demikian, analisis terhadap grafik tersebut memberikan kesimpulan yang sama dengan *chow test* dan *hausman test* sebelumnya, yang mana pendekatan *fixed-effect* merupakan pendekatan terbaik dibandingkan dua pendekatan lainnya.

#### 4.2.1 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel pengganggu (e) dalam model regresi ini berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji jarque bera. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan hasil dari uji normalitas.

**Gambar 4.5**  
**Uji Normalitas Jarque Bera**



Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dengan melihat nilai *jarque bera* dan probabilitasnya pada penelitian ini sebesar

0,440, yang artinya lebih besar dari nilai alpha (0,05) atau  $0,440 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan korelasi antara variabel bebas dengan model regresi yang sedang digunakan. Suatu model dapat dikatakan baik apabila di dalam model tersebut tidak terdapat korelasi antar variabel bebasnya. Untuk melihat ada maupun tidak adanya korelasi antar variabel bebas, dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas pada model yang digunakan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 4.6**  
**Uji Multikolinieritas**

| Variable | Coefficient<br>Variance | Uncentered<br>VIF | Centered<br>VIF |
|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| C        | 0.045512                | 1399.277          | NA              |
| LOGPP    | 0.000255                | 1577.433          | 1.215097        |
| LOGKP    | 0.000156                | 899.4103          | 1.893109        |
| LOGEP    | 0.000134                | 686.8479          | 1.992164        |

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai dari *variance inflation factor* (VIF) pada sektor pendidikan ( $X_1$ ) sebesar 1,215, sedangkan pada sektor kesehatan ( $X_2$ ) sebesar 1,893 dan sektor

ekonomi ( $X_3$ ) adalah sebesar 1.992. berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel penelitian memperoleh nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas pada data penelitian ini.

#### 4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi yang digunakan. Model regresi yang dinyatakan valid untuk menjadi instrumen penelitian apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji yang digunakan adalah *Breusch Pagan Godfrey*. Keputusan menerima  $H_0$  yakni homoskedastisitas apabila prob  $F$ -statistic  $> 0,05$ . Sebaliknya jika prob  $F$ -statistic  $< 0,05$  maka menolak  $H_0$  yakni heteroskedastisitas.. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.7**  
**Uji Heteroskedastisitas**

|                     |          |                     |        |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic         | 0.221558 | Prob. F(3,88)       | 0.8812 |
| Obs*R-squared       | 0.689676 | Prob. Chi-Square(3) | 0.8756 |
| Scaled explained SS | 1.408402 | Prob. Chi-Square(3) | 0.7036 |

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai dari  $F$ -Statistic yaitu sebesar 0,881 lebih besar dari 0,05. Maka  $H_0$  diterima dan tidak terjadinya heteroskedastisitas pada penelitian ini dan dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

#### 4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi pada variabel data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson dengan kriteria apabila nilai DW lebih besar daripada nilai dU dan dL serta nilai DW lebih kecil daripada 4-dU dan 4-dL. Adapun hasil dari autokorelasi pada penelitian ini adalah:

**Tabel 4.8**  
**Uji Autokorelasi**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Durbin-Watson stat | 1.159639 |
|--------------------|----------|

*Sumber: Data diolah (2022)*

Dari tabel diatas bahwa nilai durbin watson sebesar 1,159 atau nilainya kurang dari 1,500 yang artinya terjadi autokorelasi. Akan tetapi autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang bukan jenis *time series* yaitu data *cross section* dan data panel uji autokorelasi tidak akan mempengaruhi hasil penelitian atau tidaklah berarti.

#### 4.2.2 Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam analisis sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia dengan

menggunakan alat analisis eviws. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil analisis yang telah didapatkan

**Tabel 4.9**  
**Regresi Linear Berganda**

| Variabel | Common Effect  |                 |           | Fixed Effect   |                 |           | Random Effect  |                 |           |
|----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
|          | C              | T-Stats         | prob      | C              | T-Stats         | prob      | C              | T-Stats         | prob      |
| C        | 3,49<br>8      | 16,39<br>8      | 0,00<br>0 | 4,10<br>2      | 59,45<br>4      | 0,00<br>0 | 4,09<br>2      | 59,41<br>0      | 0,00<br>0 |
| LOGP     | 0,09<br>0      | 5,691<br>0      | 0,00<br>0 | 0,00<br>9      | 2,001<br>9      | 0,04<br>2 | 0,01<br>2      | 2,578<br>1      | 0,01<br>1 |
| LOGK     | 0,00<br>7      | 0,692<br>0      | 0,53<br>0 | 0,00<br>9      | 3,171<br>2      | 0,00<br>9 | 0,00<br>9      | 3,130<br>2      | 0,00<br>2 |
| LOGE     | -<br>0,05<br>0 | -<br>4,339<br>0 | 0,00<br>0 | -<br>0,00<br>9 | -<br>2,359<br>1 | 0,02<br>1 | -<br>0,01<br>1 | -<br>2,925<br>4 | 0,00<br>4 |

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{LogIPM} = 4,102 + 0,009\text{LogPp} + 0,009\text{LogKp} - 0,009\text{LogEp}$$

Sehingga dari uji regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 4,102 menunjukkan bahwa apabila variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi nilainya nol, maka angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 4,102.
- Nilai koefisien regresi sektor pendidikan ( $X_1$ ) sebesar 0,009 yang berarti setiap pengeluaran pendidikan mengalami kenaikan 1 satuan dan apabila variabel independen lainnya

tetap maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,009.

- c. Nilai koefisien regresi sektor kesehatan ( $X_2$ ) sebesar 0,009 yang berarti setiap pengeluaran kesehatan mengalami kenaikan 1 satuan dan apabila variabel independen lainnya tetap maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,009.
- d. Nilai koefisien regresi sektor ekonomi ( $X_1$ ) sebesar  $-0.009$  yang berarti setiap pengeluaran ekonomi mengalami penurunan 1 satuan dan apabila variabel independen lainnya tetap maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,009. Koefisien bernilai negative, artinya pengeluaran ekonomi berhubungan negative dengan indeks pembangunan manusia, sehingga apabila pengeluaran ekonomi turun maka angka IPM akan naik, demikian pula sebaliknya.

#### **4.2.5 Uji Hipotesis**

##### **4.1.5.1 Uji Parsial**

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan (sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia). Berikut merupakan tabel hasil Uji T yang telah diperoleh:

**Tabel 4.10**  
**Uji Parsial**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 4.102168    | 0.068997   | 59.45439    | 0.0000 |
| LOGPP    | 0.009694    | 0.004845   | 2.001070    | 0.0495 |
| LOGKP    | 0.009575    | 0.003019   | 3.171547    | 0.0023 |
| LOGEP    | -0.009628   | 0.004081   | -2.359442   | 0.0213 |

*Sumber: Data diolah (2022)*

Berdasarkan tabel diatas nilai probabilitas sektor pendidikan ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,049 yang berarti nilai probabilitas dari pengeluaran pendidikan tersebut lebih kecil daripada nilai alpha yaitu 0,05 ( $0,049 < 0,05$ ). Maka, pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan nilai probabilitas sektor kesehatan ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,002 yang berarti nilai probabilitas dari pengeluaran kesehatan tersebut lebih besar daripada nilai alpha yaitu 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ). Maka, pengeluaran kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan nilai probabilitas sektor ekonomi ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,021 yang berarti nilai probabilitas dari pengeluaran pendidikan tersebut lebih besar daripada nilai alpha yaitu 0,05 ( $0,021 < 0,05$ ). Maka, pengeluaran ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **4.1.5.2 Uji Simultan**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Indeks

Pembangunan Manusia). Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil Uji F yang telah diperoleh.

**Tabel 4.11**  
**Uji Simultan**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| F-statistic       | 105.8679 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |

*Sumber: Data diolah (2022)*

Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai uji F pada variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). F hitung sebesar 105,867 dengan nilai probabilitas  $0.000 < \alpha 0.05$ . Hal tersebut menggambarkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Indeks Pembangunan Manusia dimana variabel independen sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi variabel Indeks Pembangunan Manusia.

#### **4.1.5.3 Uji Determinasi**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Model ini dikatakan kuat apabila dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dimana ketika nilai determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati satu. Sebaliknya, apabila kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat masih sangat terbatas (Ketika nilai determinasi ( $R^2$ ) mendekati nol), maka model ini dikatakan lemah. Berikut merupakan tabel yang dapat menunjukkan hasil pengujian determinasi yang telah diperoleh:

**Tabel 4.12**  
**Uji Determinasi**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.975670 |
| Adjusted R-squared | 0.966454 |

*Sumber: Data diolah (2022)*

Berdasarkan tabel diatas nilai  $R^2$  sebesar 0,966 yang berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh pendidikan, kesehatan dan ekonomi hanya sebesar 96,6% sedangkan sisanya 3,4% dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti ketimpangan gender, kemiskinan dan lain sebagainya.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Pendidikan (X<sub>1</sub>) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh**

Nilai probabilitas sektor pendidikan (X<sub>1</sub>) adalah sebesar 0,049 yang berarti nilai probabilitas dari pengeluaran pendidikan tersebut lebih kecil daripada nilai alpha yaitu 0,05 ( $0,049 < 0,05$ ). Maka, pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan pengujian melalui statistika menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran cenderung terhadap peningkatan gaji

guru, tunjangan guru, dana bantuan sekolah serta beasiswa. Selain itu kurangnya penyampaian materi yang diserap dengan baik juga akan berdampak pada tingkat pengetahuan murid yang mengakibatkan penurunan skill yang didapat selama sekolah.

Belanja daerah yang dialokasikan mempengaruhi perkembangan sektor pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pengeluaran untuk kegiatan murid, guru, dan keperluan sekolah, namun juga peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan dalam menunjang kegiatan belajar yang dapat mendorong meningkatnya jumlah murid mampu menyelesaikan sekolah sampai ketingkat lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat semakin mudah menerapkan dan mendapatkan hasil dari ilmu yang didapat untuk meningkatkan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dan sektor lainnya karena dengan pendidikan yang berkualitas menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Pada *maqashid syariah* pendidikan merupakan menjaga akal atau *hifz al-aql* yang merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan menjauhi larangan dan menjalankan perintah-Nya. Adapun tingkatan pendidikan pada *maqashid syariah* yaitu *hajiyyat* yaitu dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan, sehingga menuntut ilmu

menjadi sebuah kewajiban untuk dapat membedakan antara baik dan buruk serta antara sebab dan akibat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarni (2017), Akbar (2016), Kahang, Saleh & Suharto (2016) serta Santoso (2013) yang menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah pada bidang pendidikan dalam memenuhi fasilitas serta tunjangan dalam pendidikan baik pada siswa maupun guru akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

#### **4.3.2 Pengaruh Belanja Pemerintah di Fungsi Kesehatan (X<sub>2</sub>) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh**

Nilai probabilitas sektor kesehatan (X<sub>2</sub>) adalah sebesar 0,002 yang berarti nilai probabilitas dari pengeluaran kesehatan tersebut lebih besar daripada nilai alpha yaitu 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ). Maka, pengeluaran kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan pengujian melalui statistika menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Sehingga belanja pemerintah yang dialokasikan pada fungsi kesehatan hal ini disebabkan karena dengan belanja pemerintah pada kesehatan akan mampu meningkatkan fasilitas pada kesehatan masyarakat, penyediaan obat-obatan dan lain sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, maka sangat dibutuhkan faktor pendorong peningkatan standar kesehatan itu sendiri, yang terdiri dari kebutuhan sarana dan prasarana

kesehatan yang mencakup tempat kesehatan diantaranya meliputi: rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Tentunya untuk menyediakan hal tersebut dibutuhkan peranan pemerintah sebagai pihak yang memegang otoritas kebijakan terkait hal itu.

Pada *maqashid syariah* kesehatan termasuk pada menjaga jiwa atau *hifz al-nafs* merupakan memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa dari tindakan yang merugikan diri sendiri baik itu dari kesehatan maupun hal lainnya. Adapun tingkatan *maqashid syariah* pada kesehatan merupakan *dharuriyah* atau memenuhi kebutuhan pokok seperti kesehatan tubuh, makanan, minuman dan lain sebagainya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarni (2017), Akbar (2016) dan Kahang, Saleh & Suharto (2016) yang menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pada bidang kesehatan akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

#### **4.3.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Di Fungsi Ekonomi ( $X_3$ ) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh**

Nilai probabilitas sektor ekonomi ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,021 yang berarti nilai probabilitas dari pengeluaran pendidikan tersebut lebih besar daripada nilai alpha yaitu 0,05 ( $0,021 < 0,05$ ). Maka, pengeluaran ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan pengujian melalui statistika menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di sektor ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Sehingga belanja pemerintah pada sektor ekonomi akan mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan indeks pembangunan manusia.

Adapun belanja pemerintah pada sektor ekonomi dialokasikan pada kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya dana yang dialokasikan pada sektor pertanian maka akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pada *maqashid syariah*, ekonomi termasuk pada menjaga harta atau *hifz al-mal* yang merupakan salah satu tujuan persyariatan hukum dibidang muamalah. Adapun tingkatan *maqasid syariah* pada *hifz mal* adalah *dharuriyat* yang merupakan mencari harta atau kegiatan muamalah dengan jalan yang baik serta halal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Fitrayati (2011), Akbar (2016) dan Kahang, Saleh & Suharto (2016) yang menyatakan bahwa alokasi dana atau anggaran yang ditujukan kepada sektor ekonomi akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

#### **4.3.4 Pengaruh Belanja Pemerintah Di Fungsi Pendidikan (X<sub>1</sub>), Kesehatan (X<sub>2</sub>) dan Ekonomi (X<sub>3</sub>) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh**

Nilai uji F pada variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). F hitung sebesar 105.867 dengan nilai probabilitas  $0.000 < \alpha 0.05$ . Hal tersebut menggambarkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Indeks Pembangunan Manusia dimana variabel independen sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi variabel Indeks Pembangunan Manusia.

Nilai  $R^2$  sebesar 0,966 yang berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh pendidikan, kesehatan dan ekonomi hanya sebesar 96,6% sedangkan sisanya 3,4% dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti ketimpangan gender, kemiskinan dan lain sebagainya. Penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Akbar (2016) dan Kahang, Saleh & Suharto (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

#### **4.3.5 Pengaruh Belanja Pemerintah Di Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Di Tinjau Dalam Persepektif Islam**

Dalam pandangan Ekonomi Islam belanja pemerintah merupakan kegiatan primer atau kegiatan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut. Belanja pemerintah akan mendukung pembangunan yang tidak hanya sebatas pada infrastruktur, akan tetapi juga akan

mendukung pembangunan baik secara moral maupun secara spiritual pada setiap masyarakatnya yang diperlukan.

Belanja yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Selain itu belanja pemerintah juga memiliki tujuan untuk penghapusan kesulitan dalam kehidupan atau penderitaan masyarakat, hal ini dapat dilihat pengeluaran belanja pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam menyediakan pendidikan serta kesehatan gratis bagi masyarakat.

Alokasi pengeluaran yang paling utama adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga akan mampu tercipta rasa tentram pada masyarakat. Pendidikan, kesehatan serta ekonomi merupakan salah satu *maqashid syariah* yang harus terpenuhi. Belanja pemerintah pada pendidikan, kesehatan serta ekonomi merupakan *maqashid syariah* pada tingkatan *dharuriyat* yang dapat diartikan sebagai sebuah keadaan pokok atau darurat apabila tidak mampu melengkapi atau mencapainya maka akan terjadi permasalahan dan kerusakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah baik pada bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi merupakan hal yang penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Apabila alokasi belanja pemerintah tidak mampu terpenuhi secara baik maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan maupun kesehatan serta kesulitan dalam ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk Anggaran pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Jadi besarnya tingkat pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan menjadi salah satu penyebab indeks pembangunan manusia, yang mana apabila terjadi peningkatan persentase pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, maka angka indeks pembangunan manusia akan meningkat. Pada *maqashid syariah* pendidikan merupakan menjaga akal atau *hifz al-aql* yang merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga. Adapun tingkatan pendidikan pada *maqashid syariah* yaitu *hajiyat* yaitu dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan, sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban untuk dapat membedakan antara baik dan buruk serta antara sebab dan akibat.

2. Anggaran Pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Jadi, besarnya tingkat pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan menjadi salah satu penyebab Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana apabila terjadi peningkatan persentase pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan angka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat. Pada *maqashid syariah* kesehatan termasuk pada menjaga jiwa atau *hifz al-nafs* merupakan memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa dari tindakan yang merugikan diri sendiri baik itu dari kesehatan maupun hal lainnya. Adapun tingkatan *maqashid syariah* pada kesehatan merupakan *dharuriyah* atau memenuhi kebutuhan pokok seperti kesehatan tubuh, makanan, minuman dan lain sebagainya.
3. Anggaran Pengeluaran pemerintah untuk fungsi ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. Jadi, besarnya tingkat pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi menjadi salah satu penyebab Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana apabila terjadi peningkatan persentase pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi angka Indeks Pembangunan Manusia akan menurun. Pada *maqashid syariah*, ekonomi termasuk pada menjaga harta atau *hifz al-*

*mal* yang merupakan salah satu tujuan persyariaan hukum di bidang muamalah. Adapun tingkatan *maqasid syariah* pada *hifz mal* adalah *dharuriyat* yang merupakan mencari harta atau kegiatan muamalah dengan jalan yang baik serta halal. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem dasar ekonomi Islam atas dasar keadilan dan kerelaan, karena menjamin ketersediaan harta adalah tujuan utama pembangunan.

## 5.2 Saran

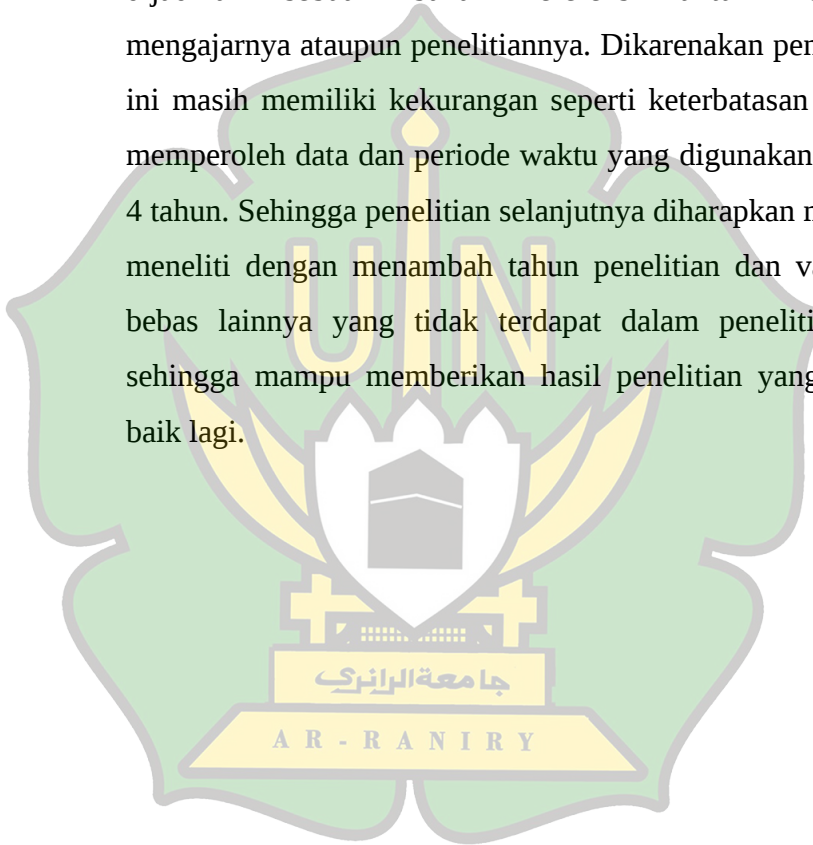
### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut hasil penelitian ini pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mendukung tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan peningkatan realisasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar bisa benar-benar terserap oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu meningkatkan mutu SDM nya terlebih dahulu yang kemudian dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan akses-akses pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.

2. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 4 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah tahun penelitian dan variabel bebas lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Aceh. (2019)  
<https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/568/indekspe-mbangunanmanusiaaceh2019.html#:~:text=Pada%202019%2C%20IPM%20Provinsi,8%20yang%20sebesar%2071%2C19.&text=IPM%20Provinsi%20Aceh%20pada%20tahun,pembe-ntuk%20IPM%20juga%20mengalami%20peningkatan.>  
Diakses tanggal 21 Mei 2021.
- Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Aceh Menurut Kabupaten/Kota. (2020).  
<https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>. Diakses tanggal 10 Maret 2022.
- Amri, K. (2021). Apakah religiositas keislaman memengaruhi ketimpangan pendapatan? Bukti data panel dari provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 156-157.
- Bhakti, N. A. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(4), 452-469.
- Hanafi & Zulham, T. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(4), 395-403.

- Kementrian Keuangan Aceh, Realisasi Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi. (2006)  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses tanggal 10 September 2021.
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A.Y. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Ratih, I. S., & Tamimah. (2021). Indeks pembangunan manusia dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 56-68.
- Safitri, I. (2016). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 1(1), 66-76.
- Salman., & Rasyidin. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 130-143.
- Santoso, S. A., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2013). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah kabupaten / kota sektor kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(4), 76-88.

- Suparno, H. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia di provinsi Kalimantan Timur. 5(1), 1-22.
- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi (studi di provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(4), 27-44.
- Universitas Negeri Ar-raniry. (2020). *Pedoman pelaksanaan penulisan skripsi*. Banda Aceh.
- Widodo, A., Waridin., & Maria, J. (2011). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 26-27.
- Sugiyono, L. (2020). Analisis situasi pembangunan manusia di Jawa Tengah. *Indonesian Journal Of Applied Statistics*, 3(1), 14-15.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 2.

- Haryanto, J. T. (2015). Kajian penyusunan model penganggaran di daerah berbasis indeks pembangunan manusia. *Jurnal Borneo Administrator*, 11(2), 185.
- Ratih, I. S., & Tamimah. (2021). Indeks pembangunan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 59-62.
- Safira., Djohan, S., & Nurjanana. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Forum Ekonomi*, 21(2), 212-214.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap PDRB melalui indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 196.
- Azwar. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/ jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 20(2), 152-153.
- Sukirno, S. (2010). *Ekonomi pembangunan: proses, masalah dan dasar kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ariansyah, S. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan

domestik regional bruto di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan dan Kebijakan Publik*, 3(4), 275.

Kuncoro, M. (2013). *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Atmawikarta, A. (2009). Investasi kesehatan untuk pembangunan ekonomi. *Jurnal Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 4-5.

Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai maqashid syariah (tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(1), 116-118.

Jajang, A., dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.

Rama, A. (2013). Pembangunan ekonomi dalam tinjauan maqashid syariah. *Jurnal Dialog*, 36(1), 32.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I DATA VARIABEL

| Kab/Kota     | Tahun | IPM | Pendidikan<br>Perkapita<br>(Rp) | Kesehatan<br>Perkapita<br>(Rp) | Ekonomi<br>Perkapita<br>(Rp) |
|--------------|-------|-----|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Simeulue     | 2016  | 64  | 1487954                         | 2452505                        | 1996876                      |
|              | 2017  | 64  | 1212368                         | 1397984                        | 1041483                      |
|              | 2018  | 65  | 1023695                         | 1334674                        | 727115                       |
|              | 2019  | 66  | 2034762                         | 1970142                        | 916731                       |
| Aceh Singkil | 2016  | 67  | 1236458                         | 482016                         | 222422                       |
|              | 2017  | 67  | 1124589                         | 1151955                        | 740178                       |
|              | 2018  | 68  | 1369874                         | 772063                         | 526072                       |
|              | 2019  | 69  | 1145897                         | 1016187                        | 704110                       |
| Aceh Selatan | 2016  | 64  | 1669793                         | 959257                         | 549416                       |
|              | 2017  | 65  | 987465                          | 1180251                        | 456847                       |
|              | 2018  | 66  | 965478                          | 1179113                        | 350121                       |
|              | 2019  | 67  | 1667856                         | 1231128                        | 485537                       |
| A. Tenggara  | 2016  | 67  | 1148356                         | 521746                         | 429143                       |
|              | 2017  | 68  | 1264307                         | 620417                         | 395717                       |
|              | 2018  | 69  | 1280233                         | 483743                         | 230072                       |

| <b>Kab/Kota</b> | <b>Tahun</b> | <b>IPM</b> | <b>Pendidikan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Kesehatan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Ekonomi<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> |
|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | 2019         | 69         | 1592701                                  | 641477                                  | 362352                                |
| Aceh Timur      | 2016         | 65         | 1025698                                  | 396219                                  | 236929                                |
|                 | 2017         | 66         | 1369874                                  | 566111                                  | 205879                                |
|                 | 2018         | 67         | 1026598                                  | 555385                                  | 138354                                |
|                 | 2019         | 67         | 1478995                                  | 589667                                  | 162588                                |
| Aceh Tengah     | 2016         | 72         | 1704665                                  | 1185755                                 | 421260                                |
|                 | 2017         | 72         | 1667579                                  | 1246136                                 | 432416                                |
|                 | 2018         | 73         | 1393916                                  | 1129615                                 | 305049                                |
|                 | 2019         | 73         | 1437256                                  | 1404725                                 | 324987                                |
| Aceh Barat      | 2016         | 69         | 1676494                                  | 1098760                                 | 520189                                |
|                 | 2017         | 70         | 1531897                                  | 1177809                                 | 440508                                |
|                 | 2018         | 70         | 1284396                                  | 1124104                                 | 411997                                |
|                 | 2019         | 71         | 1448744                                  | 1301333                                 | 486603                                |
| Aceh Besar      | 2016         | 72         | 2321564                                  | 404335                                  | 332058                                |
|                 | 2017         | 72         | 939480                                   | 476786                                  | 378823                                |
|                 | 2018         | 73         | 1987654                                  | 478698                                  | 234047                                |

| <b>Kab/Kota</b> | <b>Tahun</b> | <b>IPM</b> | <b>Pendidikan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Kesehatan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Ekonomi<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> |
|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | 2019         | 74         | 1236954                                  | 590147                                  | 315468                                |
| Pidie           | 2016         | 69         | 1467249                                  | 66580                                   | 432135                                |
|                 | 2017         | 70         | 1133963                                  | 818573                                  | 194726                                |
|                 | 2018         | 70         | 990250                                   | 867739                                  | 180932                                |
|                 | 2019         | 70         | 1097485                                  | 1015813                                 | 252329                                |
| Bireuen         | 2016         | 70         | 1222679                                  | 507188                                  | 229224                                |
|                 | 2017         | 71         | 1023355                                  | 756700                                  | 248181                                |
|                 | 2018         | 71         | 937717                                   | 728723                                  | 163993                                |
|                 | 2019         | 72         | 2003126                                  | 733679                                  | 196259                                |
| Aceh Utara      | 2016         | 67         | 1031732                                  | 510698                                  | 244243                                |
|                 | 2017         | 68         | 1013229                                  | 542909                                  | 211275                                |
|                 | 2018         | 68         | 1053323                                  | 661850                                  | 122569                                |
|                 | 2019         | 69         | 1180606                                  | 739176                                  | 167177                                |
| A. Barat Daya   | 2016         | 65         | 1638863                                  | 1104552                                 | 577138                                |
|                 | 2017         | 65         | 1435996                                  | 1435996                                 | 642271                                |
|                 | 2018         | 66         | 1204992                                  | 898798                                  | 414545                                |

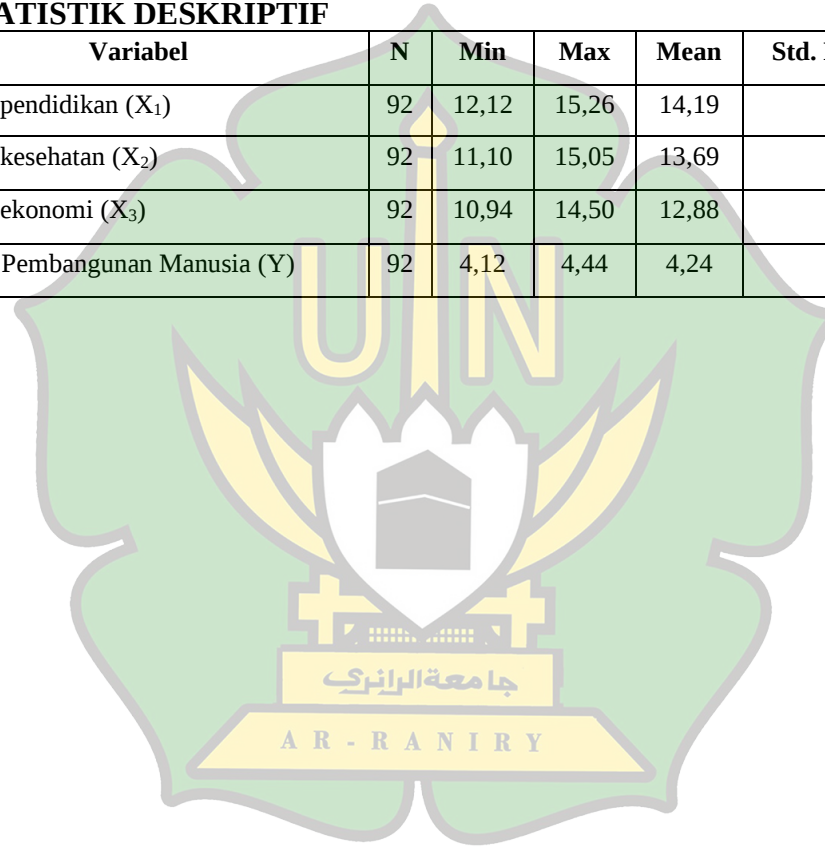
| <b>Kab/Kota</b> | <b>Tahun</b> | <b>IPM</b> | <b>Pendidikan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Kesehatan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Ekonomi<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> |
|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | 2019         | 67         | 1418886                                  | 1145616                                 | 794558                                |
| Gayo Lues       | 2016         | 64         | 1941230                                  | 1728083                                 | 1423190                               |
|                 | 2017         | 65         | 1123696                                  | 1845767                                 | 871611                                |
|                 | 2018         | 66         | 1482017                                  | 1309270                                 | 625874                                |
|                 | 2019         | 67         | 1720624                                  | 1437199                                 | 968568                                |
| A. Tamiang      | 2016         | 67         | 1065378                                  | 690998                                  | 287197                                |
|                 | 2017         | 68         | 1052872                                  | 1052872                                 | 199704                                |
|                 | 2018         | 68         | 970617                                   | 590443                                  | 196987                                |
|                 | 2019         | 69         | 1106534                                  | 687055                                  | 262408                                |
| Nagan Raya      | 2016         | 67         | 183861                                   | 91394                                   | 56558                                 |
|                 | 2017         | 68         | 1798542                                  | 1798542                                 | 407967                                |
|                 | 2018         | 68         | 1360919                                  | 931174                                  | 334948                                |
|                 | 2019         | 69         | 1472348                                  | 1038348                                 | 414573                                |
| Aceh Jaya       | 2016         | 68         | 1232126                                  | 1445737                                 | 1495630                               |
|                 | 2017         | 68         | 2377431                                  | 2377431                                 | 1275113                               |
|                 | 2018         | 69         | 1805098                                  | 1229203                                 | 756299                                |

| <b>Kab/Kota</b> | <b>Tahun</b> | <b>IPM</b> | <b>Pendidikan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Kesehatan<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> | <b>Ekonomi<br/>Perkapita<br/>(Rp)</b> |
|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | 2019         | 70         | 2211896                                  | 1505596                                 | 979577                                |
| Bener Meriah    | 2016         | 71         | 2013654                                  | 159439                                  | 83290                                 |
|                 | 2017         | 72         | 1401422                                  | 1401422                                 | 488125                                |
|                 | 2018         | 72         | 1215358                                  | 961803                                  | 355955                                |
|                 | 2019         | 73         | 2989789                                  | 1183929                                 | 542952                                |
| Pidie Jaya      | 2016         | 71         | 1473530                                  | 786527                                  | 554048                                |
|                 | 2017         | 72         | 2013698                                  | 1247085                                 | 526667                                |
|                 | 2018         | 72         | 1133061                                  | 864007                                  | 394880                                |
|                 | 2019         | 73         | 1426207                                  | 1009981                                 | 505335                                |
| Banda Aceh      | 2016         | 84         | 1663550                                  | 766063                                  | 298949                                |
|                 | 2017         | 84         | 1369878                                  | 1186006                                 | 272120                                |
|                 | 2018         | 84         | 1987986                                  | 782653                                  | 322385                                |
|                 | 2019         | 85         | 1369874                                  | 720429                                  | 380742                                |
| Sabang          | 2016         | 73         | 3567433                                  | 663576                                  | 540248                                |
|                 | 2017         | 74         | 3458929                                  | 3458929                                 | 1721189                               |
|                 | 2018         | 75         | 3259130                                  | 2560565                                 | 1425614                               |

| Kab/Kota     | Tahun | IPM | Pendidikan<br>Perkapita<br>(Rp) | Kesehatan<br>Perkapita<br>(Rp) | Ekonomi<br>Perkapita<br>(Rp) |
|--------------|-------|-----|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|              | 2019  | 76  | 4214971                         | 2968760                        | 1474157                      |
| Langsa       | 2016  | 75  | 2156474                         | 334107                         | 744633                       |
|              | 2017  | 76  | 1659874                         | 1089342                        | 235079                       |
|              | 2018  | 76  | 1469874                         | 1189191                        | 193350                       |
|              | 2019  | 77  | 2159895                         | 1351615                        | 221835                       |
| Lhokseumawe  | 2016  | 76  | 2698954                         | 400362                         | 222927                       |
|              | 2017  | 76  | 1078971                         | 1078971                        | 196630                       |
|              | 2018  | 77  | 2659874                         | 412217                         | 137407                       |
|              | 2019  | 77  | 2698954                         | 475282                         | 140715                       |
| Subulussalam | 2016  | 62  | 1236987                         | 1802219                        | 1194558                      |
|              | 2017  | 63  | 1265987                         | 1613417                        | 825720                       |
|              | 2018  | 63  | 1396180                         | 1024854                        | 565700                       |
|              | 2019  | 64  | 1763863                         | 1285451                        | 771855                       |

## LAMPIRAN II STATISTIK DESKRIPTIF

| Variabel                       | N  | Min   | Max   | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|
| Sektor pendidikan ( $X_1$ )    | 92 | 12,12 | 15,26 | 14,19 | 0,39           |
| Sektor kesehatan ( $X_2$ )     | 92 | 11,10 | 15,05 | 13,69 | 0,63           |
| Sektor ekonomi ( $X_3$ )       | 92 | 10,94 | 14,50 | 12,88 | 0,69           |
| Indeks Pembangunan Manusia (Y) | 92 | 4,12  | 4,44  | 4,24  | 0,06           |



### LAMPIRAN III ESTIMASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOGIPM

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/22 Time: 03:27

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                  | 3.498305    | 0.213335              | 16.39818    | 0.0000 |
| LOGPP              | 0.090800    | 0.015954              | 5.691249    | 0.0000 |
| LOGKP              | 0.007850    | 0.012475              | 0.629255    | 0.5308 |
| LOGEP              | -0.050248   | 0.011579              | -4.339387   | 0.0000 |
| R-squared          | 0.327135    | Mean dependent var    | 4.246793    |        |
| Adjusted R-squared | 0.304196    | S.D. dependent var    | 0.065578    |        |
| S.E. of regression | 0.054702    | Akaike info criterion | -2.931324   |        |
| Sum squared resid  | 0.263324    | Schwarz criterion     | -2.821681   |        |
| Log likelihood     | 138.8409    | Hannan-Quinn criter.  | -2.887071   |        |
| F-statistic        | 14.26134    | Durbin-Watson stat    | 0.501704    |        |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000    |                       |             |        |

## LAMPIRAN IV ESTIMASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOGIPM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/01/22 Time: 03:28  
Sample: 2016 2019  
Periods included: 4  
Cross-sections included: 23  
Total panel (balanced) observations: 92

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 4.102168    | 0.068997   | 59.45439    | 0.0000 |
| LOGPP    | 0.009694    | 0.004845   | 2.001070    | 0.0495 |
| LOGKP    | 0.009575    | 0.003019   | 3.171547    | 0.0023 |
| LOGEP    | -0.009628   | 0.004081   | -2.359442   | 0.0213 |

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

|                    |          |                       |           |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared          | 0.975670 | Mean dependent var    | 4.246793  |
| Adjusted R-squared | 0.966454 | S.D. dependent var    | 0.065578  |
| S.E. of regression | 0.012011 | Akaike info criterion | -5.772897 |
| Sum squared resid  | 0.009522 | Schwarz criterion     | -5.060218 |
| Log likelihood     | 291.5533 | Hannan-Quinn criter.  | -5.485253 |
| F-statistic        | 105.8679 | Durbin-Watson stat    | 1.159639  |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 |                       |           |

## LAMPIRAN V ESTIMASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOGIPM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/01/22 Time: 03:30

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable              | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.    |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| C                     | 4.092801    | 0.068890           | 59.41060    | 0.0000   |
| LOGPP                 | 0.012398    | 0.004807           | 2.578996    | 0.0116   |
| LOGKP                 | 0.009432    | 0.003013           | 3.130176    | 0.0024   |
| LOGEP                 | -0.011725   | 0.004008           | -2.925762   | 0.0044   |
| Effects Specification |             |                    |             |          |
|                       |             |                    | S.D.        | Rho      |
| Cross-section random  |             |                    | 0.046512    | 0.9375   |
| Idiosyncratic random  |             |                    | 0.012011    | 0.0625   |
| Weighted Statistics   |             |                    |             |          |
| R-squared             | 0.151612    | Mean dependent var |             | 0.543820 |
| Adjusted R-squared    | 0.122690    | S.D. dependent var |             | 0.014065 |
| S.E. of regression    | 0.013174    | Sum squared resid  |             | 0.015273 |
| F-statistic           | 5.242035    | Durbin-Watson stat |             | 0.758252 |
| Prob(F-statistic)     | 0.002245    |                    |             |          |
| Unweighted Statistics |             |                    |             |          |
| R-squared             | 0.089516    | Mean dependent var |             | 4.246793 |
| Sum squared resid     | 0.356316    | Durbin-Watson stat |             | 0.032502 |

## LAMPIRAN VI UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test             | Statistic  | d.f.    | Prob.  |
|--------------------------|------------|---------|--------|
| Cross-section F          | 79.967258  | (22,66) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 305.424706 | 22      | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOGIPM

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/22 Time: 03:29

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 3.498305    | 0.213335   | 16.39818    | 0.0000 |
| LOGPP    | 0.090800    | 0.015954   | 5.691249    | 0.0000 |
| LOGKP    | 0.007850    | 0.012475   | 0.629255    | 0.5308 |
| LOGEP    | -0.050248   | 0.011579   | -4.339387   | 0.0000 |

|                    |          |                       |           |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared          | 0.327135 | Mean dependent var    | 4.246793  |
| Adjusted R-squared | 0.304196 | S.D. dependent var    | 0.065578  |
| S.E. of regression | 0.054702 | Akaike info criterion | -2.931324 |
| Sum squared resid  | 0.263324 | Schwarz criterion     | -2.821681 |
| Log likelihood     | 138.8409 | Hannan-Quinn criter.  | -2.887071 |
| F-statistic        | 14.26134 | Durbin-Watson stat    | 0.501704  |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 |                       |           |

## LAMPIRAN VII UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 20.870664         | 3            | 0.0001 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed     | Random    | Var(Diff.) | Prob.  |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| LOGPP    | 0.009694  | 0.012398  | 0.000000   | 0.0000 |
| LOGKP    | 0.009575  | 0.009432  | 0.000000   | 0.4470 |
| LOGEP    | -0.009628 | -0.011725 | 0.000001   | 0.0063 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGIPM

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/22 Time: 03:31

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 92

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 4.102168    | 0.068997   | 59.45439    | 0.0000 |
| LOGPP    | 0.009694    | 0.004845   | 2.001070    | 0.0495 |
| LOGKP    | 0.009575    | 0.003019   | 3.171547    | 0.0023 |
| LOGEP    | -0.009628   | 0.004081   | -2.359442   | 0.0213 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

|                    |          |                       |           |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared          | 0.975670 | Mean dependent var    | 4.246793  |
| Adjusted R-squared | 0.966454 | S.D. dependent var    | 0.065578  |
| S.E. of regression | 0.012011 | Akaike info criterion | -5.772897 |
| Sum squared resid  | 0.009522 | Schwarz criterion     | -5.060218 |
| Log likelihood     | 291.5533 | Hannan-Quinn criter.  | -5.485253 |
| F-statistic        | 105.8679 | Durbin-Watson stat    | 1.159639  |

Prob(F-statistic) 0.000000

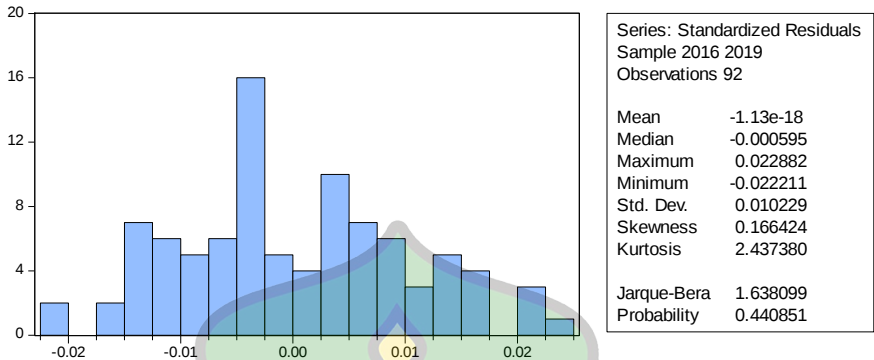
## LAMPIRAN VIII UJI MULTIKOLINIERITAS

| Variable | Coefficient<br>Variance | Uncentered<br>VIF | Centered<br>VIF |
|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| C        | 0.045512                | 1399.277          | NA              |
| LOGPP    | 0.000255                | 1577.433          | 1.215097        |
| LOGKP    | 0.000156                | 899.4103          | 1.893109        |
| LOGEP    | 0.000134                | 686.8479          | 1.992164        |

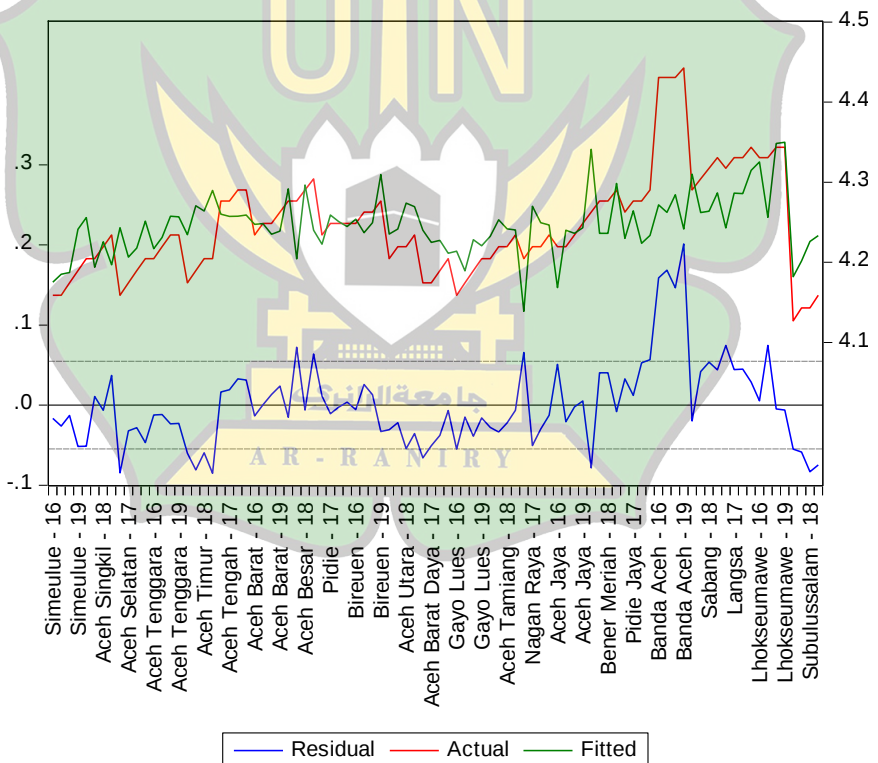
## LAMPIRAN IX UJI HETEROKEDASTISITAS

|                     |          |                     |        |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic         | 0.221558 | Prob. F(3,88)       | 0.8812 |
| Obs*R-squared       | 0.689676 | Prob. Chi-Square(3) | 0.8756 |
| Scaled explained SS | 1.408402 | Prob. Chi-Square(3) | 0.7036 |

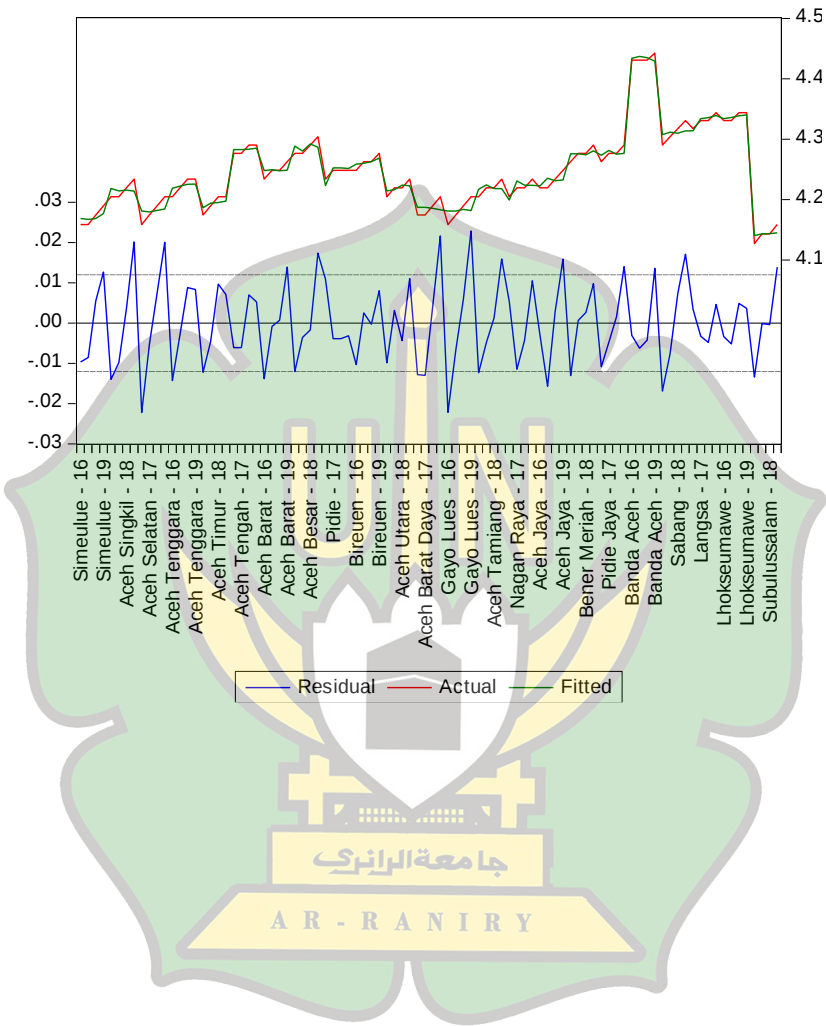
## LAMPIRAN X GAMBAR GRAFIK UJI NORMALITAS



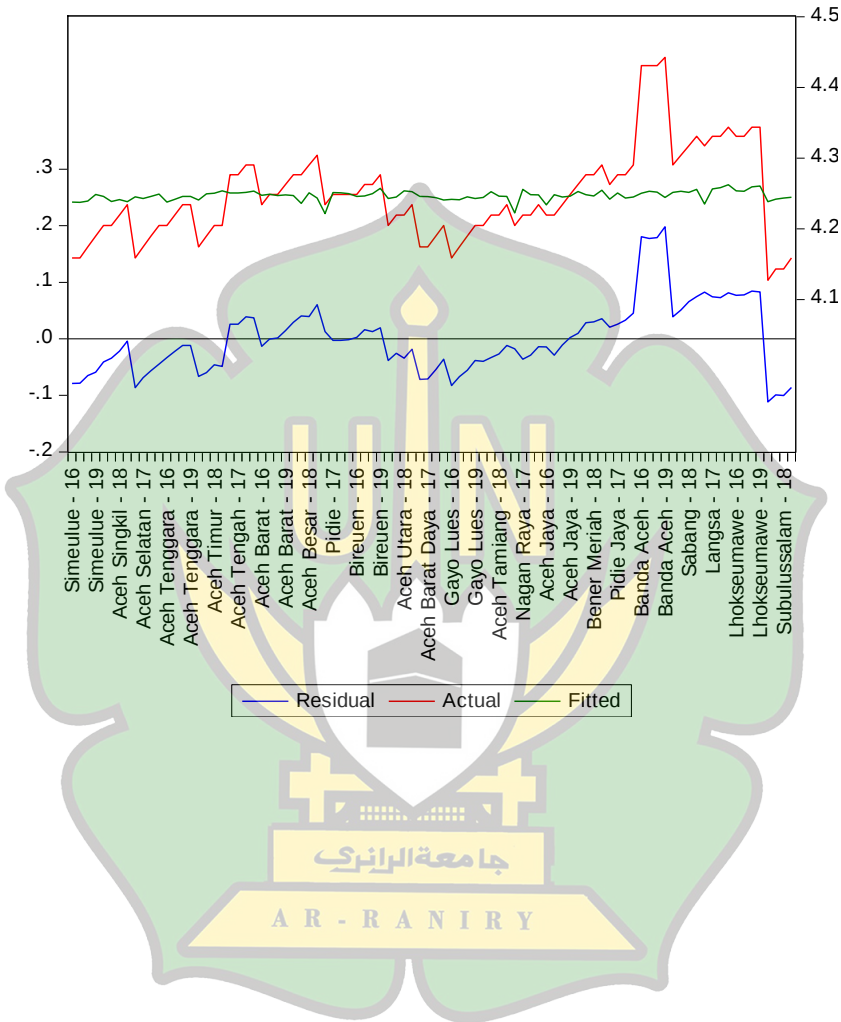
## LAMPIRAN XI GAMBAR RESIDUAL PADA MODEL COMMON EFFECT



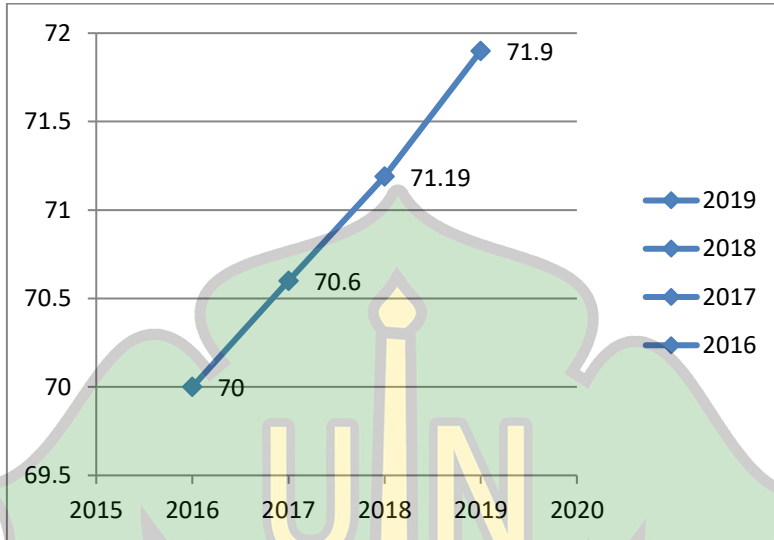
# LAMPIRAN XII GAMBAR RESIDUAL PADA MODEL FIXED EFFECT



# LAMPIRAN XIII GAMBAR RESIDUAL PADA MODEL RANDOM EFFECT



#### LAMPIRAN XIV GRAFIK IPM PROVINSI ACEH TAHUN 2016-2019



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Irsalina  
NIM : 180602106  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 31 Juli 2000  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Gp. MeunasahKrueng, Pagar Air,  
Aceh Besar

No. Hp : 0822 8794 9091  
Email : iirsalina31@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. SD : SDIT Nurul Fikri  
Lulus Tahun 2012
2. SMP : MTs Oemar Diyan  
Lulus Tahun 2015
3. SMA : MAS Oemar Diyan  
Lulus Tahun 2018
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Ar-Raniry Lulus  
Tahun 2023

### Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Dahlan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Hj. Asniah  
Pekerjaan : -

Banda Aceh, 14 April 2023  
Penulis,

Irsalina